

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF

Edisi Oktober Tahun 2021 No. 21

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.

*Tak Libatkan Masyarakat
dan Ahli dalam Penyusunan
Naskah Akademik*

**PKS Tolak
RUU Ibu Kota
Negara**

Infrastruktur Yang Terukur

Pembangunan sejatinya adalah kebutuhan publik, bukan kepentingan politik. Kenyataannya, proyek-proyek ambisius ini tampaknya sekadar menjadi sarana pendongkrak elektabilitas di pesta demokrasi mendatang. Perencanaannya bak dikejar tayang, pelaksanaannya kurang terencana, dan rakyat lah yang menanggung akibatnya.

Tak ada yang memungkirkan pembangunan infrastruktur, membutuhkan investasi jangka panjang dengan nilai besar, untuk tak dibalang fantastis. Karena investasi yang besar itu pula, segala sesuatunya harus direncanakan dengan matang. Termasuk risiko, kepastian pengembalian investasi, dan potensi keuntungan yang berkelanjutan.

Tidak bisa dipungkiri salah satu program politik yang paling mudah untuk mendapatkan simpati dan elektabilitas adalah infrastruktur. Bukan hanya bisa diukur tapi juga terlihat nyata. Tegak berdiri, kokoh tertancap. Karenanya tidak jarang

para pemimpin menciptakan mega proyek agar dijadikan etalase peninggalan dan 'jejak' kekuasaan untuk meraih jabatan yang lain. Dikemas dan dipoles dengan pendekatan Pesan yang menarik, dipublikasikan di berbagai chanel dan diterima oleh publik secara massif.

Tapi infrastruktur juga punya catatan sejarah yang kurang melegakan, terlebih di negara ini. Ada venue, bandara udara, jalan, jembatan, dan lainnya cukup banyak terbelangkalai dan fungsinya tidak maksimal. Hal ini terjadi karena tidak cermat kalkulasi investasi atau proses feasibility studies (FS) tidak memadai. Dari

sejumlah indikator yang perlu dipenuhi sangat mungkin tidak terpenuhi dan punya kesalahan mendasar, tapi syahwat politik kadang sudah menggantung.

Ambil contoh kereta cepat Jakarta-Bandung yang ramai belakangan ini. Proyek yang disetujui pada 2015 ini dikerjakan oleh konsorsium PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina) secara business to business. Pemerintah bahkan menjamin bahwa pembiayaan proyek ini tidak akan dibiayai oleh negara. Masyarakat boleh bernafas lega, meski infrastruktur transportasi kereta cepat untuk menghubungkan daerah di Pulau Jawa yang sudah begitu

terkoneksi sebenarnya menyisakan pertanyaan. Memang seberapa urgen, sih, menghubungkan dua kota besar berjarak 150 kilometer dengan kereta cepat ketika masih ada opsi pesawat, kereta api, travel, dan mobil pribadi?

Belum lagi, mega proyek tersebut mengalami pembengkakan biaya hingga Rp27,74 triliun. Kemudian, Oktober 2021 lalu, Jokowi malah mengeluarkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 dalam rangka percepatan pembangunan kereta cepat. Isinya tidak main-main; proyek yang kini bernilai Rp112,24 triliun ini bisa didanai APBN.

Pembangunan sejatinya

adalah kebutuhan publik, bukan kepentingan politik. Kenyataannya, proyek-proyek ambisius ini tampaknya sekadar menjadi sarana pendongkrak elektabilitas di pesta demokrasi mendatang. Perencanaannya bak dikejar tayang, pelaksanaannya kurang terencana, dan rakyat lah yang menanggung akibatnya.

Penggelontoran dana yang semestinya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat kini dicomot untuk menambal kecacatan proyek yang ada. Rakyat tidak meminta, tapi harus membayar. Pembangunan yang seharusnya memudahkan, malah menyulitkan. ■



Tak Libatkan Masyarakat dan Ahli dalam penyusunan Naskah Akademik, PKS Tolak RUU Ibu Kota Negara

KUTIPAN

Jakarta (02/10) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan oleh Pemerintah.

Fraksi PKS melalui Anggota Komisi V, Suryadi Jaya Purnama berpendapat, masyarakat luas perlu mengetahui secara rinci alasan yang menjadi pertimbangan pemindahan Ibu Kota Negara ini beserta konsekuensinya.

"Banyaknya pertanyaan yang muncul di masyarakat membuktikan bahwa persiapan Pemerintah dalam menyusun Naskah Akademik dan RUU IKN tidak melibatkan partisipasi masyarakat," jelas pria yang akrab disapa SJP.

Tidak adanya diskusi publik yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik RUU IKN, kata SJP, menyebabkan beberapa pakar mempertanyakan dan menyampaikan pendapatnya melalui berbagai

media dan berharap adanya ruang untuk berdiskusi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara ini.

"Hal ini merupakan sesuatu yang wajar sebab pemindahan Ibu Kota Negara ini tentunya bukan tanpa resiko, baik itu dari segi pembiayaan maupun dari sisi pemilihan lokasinya yang belum tentu bebas bencana," tandasnya.

Terkait adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini, ungkap SJP, disebutkan dalam Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik tertulis dan/atau lisan

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Hal ini pun ditegaskan pula dalam lampiran UU No.12 Tahun 2011 terkait sistematika Naskah Akademik dimana disebutkan bahwa salah satu metoda penyusunan Naskah Akademik adalah dengan menggunakan metoda yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat," papar Anggota FPKS Asal NTB ini.

Oleh sebab itu, tegas SJP, FPKS menolak pembahasan RUU IKN karena proses penyusunannya yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat luas.

"Apalagi di saat pandemi yang masih belum usai ini, sudah barang tentu perhatian masyarakat lebih tertuju pada



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.
Anggota Komisi V DPR RI

"Tidak adanya diskusi publik yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik RUU IKN, kata SJP, menyebabkan beberapa pakar mempertanyakan dan menyampaikan pendapatnya melalui berbagai media dan berharap adanya ruang untuk berdiskusi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara ini"

pemulihan ekonomi dan kesehatan. Seharusnya Pemerintah membersamai masyarakat dalam penanganan pandemi ini," urainya.

Jangan sampai, tegas SJP, kurangnya diskusi publik akibat

masih berlangsungnya pandemi kemudian menyebabkan Naskah Akademik dan RUU yang dibuat menjadi tidak berkualitas.

Selengkapnyapun kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Wacana Super App PeduliLindungi,

Aleg PKS : Pastikan Security Data Memadai

KUTIPAN

Jakarta (03/10) — Sebagai alat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, pemerintah meluncurkan aplikasi PeduliLindungi. Namun, Luhut Binsar Panjaitan mewacanakan aplikasi tersebut akan dikembangkan menjadi super app yang mencakup fungsi pembayaran digital.

Menanggapi hal tersebut, Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Minggu (3/10) melalui telepon seluler menyatakan,

"Pertama, pemerintah harus memastikan dan menjamin aspek security selain fungsi, baik ketahanan aplikasi yang kuat tidak mudah diretas, juga soal keamanan data pribadinya. Jangan bicara tambah fungsi menjadi super app kalau security data pengguna belum memadai."

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan kita musti belajar dari pengalaman bocornya data E-hac dan sudah teralalu seringnya kebocoran data pribadi terjadi di negara kita, maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menjamin aspek security tersebut.

"Masyarakat memiliki hak sebagai warga negara untuk mendapat perlindungan dari negara. Jangan sampai ada lagi kebocoran data dan sikap pengelola yang terkesan saling lempar tanggung jawab yang berakibat warga tercederai haknya dan menanggung kerugian," papar Sukamta.

Kedua, Sukamta melanjutkan, sejauh ini aplikasi PeduliLindungi bisa dikatakan masih belum maksimal, baik kestabilan aplikasinya maupun kerepotan pelaksanaan di lapangan. Hal ini tergambar dari banyaknya keluhan warga. Di antaranya karena tidak semua warga negara memiliki smartphone, ini harus dicari solusinya.

"Jangan cuma gara-gara seseorang tidak memiliki

smartphone, karena handphone yang dimilikinya hanya handphone biasa yang tentu tidak bisa mengakses PeduliLindungi, lantas mempersulit warga untuk beraktivitas. Mestinya negara memfasilitasi warga yang 'tidak bisa' menggunakan smartphone karena berbagai sebab ini," ujarnya

Bagi yang sudah menggunakan smartphone, tambah Sukamta, juga mengeluh. Entah karena gagap teknologi yang biasanya dialami oleh warga yang berusia lanjut, mereka tidak paham bagaimana menggunakannya, maupun tentang kestabilan aplikasi PeduliLindungi itu sendiri. Diantara keluhannya soal aplikasi tersebut yang butuh energi besar yang menyebabkan baterai handphone menjadi boros. Belum lagi pada kasus tertentu aplikasi tersebut susah diakses yang menyebabkan warga jadi terganggu dan habis waktunya (wasting time) jika sedang bepergian.

"Jadi, vendor harus mengevaluasi dan membuat aplikasi PeduliLindungi yang nyaman dan user friendly. Jangan malah membuat repot pengguna. Semua warga negara pada dasarnya memiliki hak



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Kalau untuk kepentingan penanggulangan pandemi, seperti misalnya sebagai syarat berpergian, ini masih bisa dimengerti, itu pun dengan banyak catatan. Tetapi kalau untuk kepentingan bisnis dengan mengorbankan HAM warga, nah ini yang perlu dipertimbangkan"

yang sama untuk dapat berpergian," ujar doktor lulusan Inggris ini.

Ketiga, ia juga menyoroti soal potensi pelanggaran HAM dengan melakukan pelacakan di setiap mobilitas masyarakat.

"Kalau untuk kepentingan penanggulangan pandemi, seperti misalnya sebagai syarat

berpergian, ini masih bisa dimengerti, itu pun dengan banyak catatan. Tetapi kalau untuk kepentingan bisnis dengan mengorbankan HAM warga, nah ini yang perlu dipertimbangkan," tegas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini

Polri Rekrut 56 Pegawai Eks-KPK, Aleg PKS: Dukung Sebagai Sarana Pengabdian bagi Bangsa dan Negara

KUTIPAN

Kapolri Listyo Sigit telah mengutarakan keinginannya menarik 56 pegawai KPK sebagai ASN di Bareskrim. Keinginan itu kata Listyo juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Jakarta (29/09) — Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri didukung Anggota Komisi III DPR. Langkah tersebut, dinilai menjadi jalan keluar terbaik.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengaku menyambut baik keinginan Kapolri tersebut. Namun, ia menilai keputusan akhir terhadap tawaran itu harus dikembalikan kepada para pegawai KPK tersebut.

"Polri dan KPK adalah

institusi penegak hukum yang memiliki kesamaan dalam hal pemberantasan korupsi," kata Nasir.

Meski demikian, Nasir berpendapat bahwa suasana kerja di KPK dan Polri tentu berbeda. Namun, ia menilai tawaran dari Kapolri tersebut seharusnya bisa dipikirkan dengan baik oleh para pegawai KPK yang tak lolos TWK.

"Ajakan dan harapan Kapolri Jenderal Sigit terhadap eks pegawai KPK itu patut dihargai dan dipikirkan. Sebab bekerja di KPK dan Polri adalah pengabdian untuk bangsa dan negara," kata dia.

Kapolri Listyo Sigit telah

mengutarakan keinginannya menarik 56 pegawai KPK sebagai ASN di Bareskrim. Keinginan itu kata Listyo juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Listyo menjelaskan ada tugas-tugas tambahan di Polri bagi pegawai KPK itu terkait dengan upaya pencegahan dan mengawal program penanggulangan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional (PEN). Oleh sebab itu, ia pun telah menyurati Presiden untuk dapat menyetujui usulan penarikan pegawai tersebut.

**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

“Suasana kerja di KPK dan Polri tentu berbeda. Namun, ia menilai tawaran dari Kapolri tersebut seharusnya bisa dipikirkan dengan baik oleh para pegawai KPK yang tak lolos TWK. Ajakan dan harapan Kapolri Jenderal Sigit terhadap eks pegawai KPK itu patut dihargai dan dipikirkan. Sebab bekerja di KPK dan Polri adalah pengabdian untuk bangsa dan negara”

Peringati Hari Tani, Hermanto Ikut Panen dan Serahkan Irigasi ke Petani Pesisir Selatan

KUTIPAN

Anggota DPR Dapil Sumbar I dari Fraksi PKS, Hermanto memperingatinya dengan ikut panen di sawah petani dilanjutkan menyerahkan 2 saluran irigasi tersier di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu (02/10).

Pesisir Selatan (02/10) — Meski Hari Tani Nasional 24 September sudah berlalu, namun peringatannya tetap berlanjut.

Anggota DPR Dapil Sumbar I dari Fraksi PKS, Hermanto memperingatinya dengan ikut panen di sawah petani dilanjutkan menyerahkan 2 saluran irigasi tersier di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu (02/10).

"Peringatan Hari Tani merupakan bentuk apresiasi kepada petani di seluruh Indonesia," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Menurutnya, para petani patut mendapat apresiasi karena telah memberikan

kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

"Mereka bekerja luar biasa sehingga sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan positif," ucapnya.

"Dimasa pandemi covid-19 ini, semua sektor mengalami pertumbuhan negatif kecuali pertanian tumbuh positif," tambah legislator dari FPKS DPR ini.

Sektor pertanian, jelasnya, memproduksi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup dan bergizi akan meningkatkan antibodi. Dengan antibodi tersebut maka masyarakat akan tahan terhadap berbagai serangan penyakit termasuk covid-19.

"Pertanian merupakan sektor yang paling kontributif dalam mengurangi dampak pandemi covid," pungkas legislator Komisi IV DPR RI ini.

Pada rangkaian kegiatan peringatan Hari Tani di Kabupaten Pesisir Selatan, Hermanto mengikuti kegiatan panen di Kampung Tanah Keras, Nagari Gurun Panjang Barat, Kecamatan Bayang. Selanjutnya menyerahkan 2 jaringan irigasi tersier bantuan pemerintah masing-masing kepada kelompok tani Banda Malintang di Kampung Ganting, Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang dan kelompok tani Banda Cubadak di Kampung Kapencong, Nagari Kapegambotoberapak, Kecamatan Bayang.

Dalam kegiatan tersebut Hermanto didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nuzirwan dan 3 tokoh muda setempat Irwan Gunawan, Efrianto dan Eko Kurniawan.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Sektor pertanian, memproduksi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup dan bergizi akan meningkatkan antibodi. Dengan antibodi tersebut maka masyarakat akan tahan terhadap berbagai serangan penyakit termasuk covid-19. Pertanian merupakan sektor yang paling kontributif dalam mengurangi dampak pandemi covid

Aleg PKS Soroti Rendahnya Dukungan APBN 2022 untuk Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

KUTIPAN

Jakarta (01/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyoroti sejumlah isu lingkungan yang menjadi perhatian DPR RI namun tidak sinkron dengan dukungan anggaran dari APBN 2022,

dimana dari pendapat akhir pemerintah terlihat belum menempatkan porsi anggaran yang memadai untuk menjawab sejumlah persoalan lingkungan seperti dampak gas karbon, rumah kaca serta masalah sampah dan juga persoalan ketahanan maupun kedaulatan pangan.

Hal ini diungkapkan Johan setelah mengikuti Rapat Paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 yang salah satu agendanya mengenai pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2022 yang bertempat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (30/09/2021)

Anggota Komisi IV DPR RI ini berharap pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup termasuk menopang lingkungan hidup yang sehat saat ini dan masa yang akan datang.

"Pemerintah harus sadar bahwa saat ini kita sedang menghadapi persoalan emisi karbondioksida yang mencapai 2.300 juta ton dan terus terjadinya alih fungsi lahan hutan yang menjadi penyumbang utama dari emisi gas rumah kaca", ujar Johan.

Politisi PKS ini menggaris-bawahi pentingnya penyusunan APBN berwawasan lingkungan, menurutnya harus ada indikator jelas terhadap indikator

lingkungan hidup sebagai salah satu pilar dalam menentukan asumsi makro dari RUU APBN setiap tahun.

"Saya melihat APBN yang berwawasan lingkungan sebagai sesuatu yang sangat penting sebab kerusakan lingkungan yang kita alami sudah sedemikian parah dan gangguan keseimbangan ekosistem perlu segera dipulihkan demi keseimbangan lingkungan yang asri agar hidup kita lebih nyaman," urai Johan.

Legislator Senayan ini juga menyoroti persoalan darurat sampah yang semakin mengkhawatirkan, Johan mendesak pemerintah berupaya keras dapat mengurangi sampah domestik sebesar 30% dan mengurangi tingkat kebocoran sampah ke laut diupayakan mencapai 70%.

"Harus ada kebijakan tegas untuk mengendalikan produksi dan konsumsi yang menimbulkan sampah plastik berskala besar dan edukasi massif kepada masyarakat agar memiliki perilaku yang lebih ramah lingkungan dan punya kesadaran tinggi untuk

**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Saya selalu mendorong agar APBN kita disusun melalui pilar lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim serta pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, mari kita selamatkan lingkungan menuju masa depan yang lebih gemilang

mencintai lingkungan," urai Johan.

Wakil Rakyat dari Dapil NTB ini mengingatkan pemerintah agar menyediakan

daya dukung anggaran memadai untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Raker Bersama KKP, Aleg PKS Berikan Sejumlah Catatan terkait Program Kerja tahun 2022

KUTIPAN

Jakarta (24/09) — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty pada rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memberi tanggapan terkait mekanisme perikanan terukur yang diusung KKP, dan penjelasan Menteri terkait perlindungan hak-hak nelayan khususnya yang mengalami musibah di laut.

Rapat kerja yang dihadiri langsung oleh Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono ini memaparkan terkait perencanaan tahun anggaran 2022 dimana Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, KKP mendapatkan alokasi anggaran

tahun 2022 sebesar Rp. 6,1 Triliun

"Saya meminta penjelasan, khususnya terkait kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan. Menurut catatan yang kami dapat, bahwa penguatan kelembagaan WPP harus menjadi agenda KKP sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Selanjutnya, perlindungan hak-hak nelayan khususnya yang mengalami musibah di laut, juga mesti menjadi perhatian khusus. Dalam 2 bulan terakhir terjadi beberapa musibah besar yang menimpa nelayan yaitu bulan juli yang lalu 17 ka-

pal nelayan tenggelam di perairan Pontianak yang menyebabkan 33 nelayan hilang dan 22 nelayan meninggal dunia", tegas Saadiah.

Legislator Indonesia Timur ini mengingatkan kembali bahwa awal bulan September ini kapal perikanan Hentri 135 mengalami kebakaran dan tenggelam di perairan Maluku utara menyebabkan 25 ABK hilang.

Tokoh perempuan asal Maluku ini juga mempertanyakan mengenai nasib penyuluh perikanan di Indonesia khususnya di Maluku yang jumlahnya sangat terbatas sedangkan kebakoran wilayah laut dan banyaknya nelayan memerlukan pendampingan dari para penyuluh.

"Kami pak, selaku perwakilan dari Maluku, meminta Menteri KKP untuk tidak menghentikan operasional Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) karena dianggap memiliki kontribusi besar dalam penyiapan tenaga terdidik khususnya dibidang operator kapal perikanan", pinter.

Politisi PKS ini juga meng-



SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya meminta penjelasan, khususnya terkait kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan. Menurut catatan yang kami dapat, bahwa penguatan kelembagaan WPP harus menjadi agenda KKP sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia."

ungkapkan, bahwa wilayah Maluku merupakan daerah penghasil perikanan tangkap terbesar di Indonesia, namun nelayannya masih didominasi oleh nelayan kecil.

Saadiah melanjutkan, Mengingat sumberdaya ikan yang ada saat ini justru banyak

dinikmati oleh kapal-kapal asing dari luar daerah, ia meminta KKP untuk melakukan upgrading nelayan di daerah tersebut sehingga mampu melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya ikan daerah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota FPKS Desak Pemerintah **Samakan Data** agar Stock Komoditas Tidak Rancu

KUTIPAN

Jakarta (29/09) — Menanggapi panen raya jagung yang terjadi di beberapa wilayah sentra jagung, Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian dan kementerian perdagangan melakukan sinkronisasi data sehingga terjadi kesepahaman bersama bahwa stok dilapangan sesuai dengan angka database di kedua lembaga pemerintah ini.

"Sumber kekacauan kebijakan dan kericuhan di lapangan ini awal munculnya dari perbedaan data yang ada. Sebagai contoh stock komoditas tertentu menurut kementan cukup, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri pada durasi tertentu, sedangkan kemendag berkata lain sehingga memunculkan kebijakan impor karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada kasus jagung yang sudah dilihatkan oleh berbagai sentra jagung yang melakukan panen raya

dengan menunjukkan ke publik bahwa jagung masih melimpah pasokannya, Saya meminta antara kementan dan kemendag ada kesepahaman data", tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengatakannya dari data yang diterima, berdasarkan angka prognosa, secara nasional, untuk di bulan September-November diperkirakan panen seluas 826.367 ha dengan produksi 3.745.928 ton. Adapun bulan Januari-November 2021 perkiraan luas panen jagung di

Indonesia 4,2 juta hektare dengan produksi 17,5 juta ton pipilan kering.

Contoh data ini, kata Akmal, kedua lembaga pemerintah ini mesti ada sepakat, dengan memastikan kondisi lapangan yang ada benar adanya, sehingga kebijakan akan tepat yang nantinya berimplikasi pada kebijakan selanjutnya.

Akmal mengharapkan, dengan pemenuhan pakan ternak dari bahan baku jagung, terutama pada produksi daging ayam dan telur ayam, di masa depan tidak ada polemik di kalangan para peternak dan juga konsumen akibat stok daging ayam atau tingginya harga daging ayam dan telur.

"Semua yang kita upayakan untuk masyarakat inikan untuk masyarakat. Produktivitas jagung yang mencapai 6,5 ton dan harga pipilan kering Rp 5.400 dinilai sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan petani. Tersedianya pakan ternak akan memudahkan para peternak unggas untuk melakukan aktivitasnya karena ketersediaan dan harga yang



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Sumber kekacauan kebijakan dan kericuhan di lapangan ini awal munculnya dari perbedaan data yang ada. Sebagai contoh stock komoditas tertentu menurut kementan cukup, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri pada durasi tertentu, sedangkan kemendag berkata lain sehingga memunculkan kebijakan impor karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri"

terjangkau. Dan masyarakat konsumen secara umum akan mendapat tata niaga yang baik karena ketersediaan pangan dari daging ayam dan telur ter-

sedia dan murah atau terjangkau harganya", urai Akmal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

INKONSISTEN, PRESIDEN SETUJU BIAYA KERETA CEPAT PAKAI APBN



PKS Meminta Pemerintah Lebih Cermat Dalam Merencanakan Proyek Raksasa

■ Tahun 2015

Presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung **tidak akan menggunakan APBN.**

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk B to B." kata Jokowi saat itu.

■ 9 Oktober 2021

Presiden Jokowi restui penggunaan APBN untuk pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut terungkap dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021.



Panjang
142,3 KM



Target Operasi
2021



Nilai investasi
Rp 86,6 Triliun



Biaya membengkak
Rp 27 Triliun



Nilai Saham

60%
PT Pilar Sinergi
BUMN Indonesia

40%
Beijing Yawan
HSR Co Ltd.



Subsidi FLPP Akan Berakhir, Aleg PKS: Jangan Bebani Masyarakat Berpenghasilan Rendah

KUTIPAN

Tasikmalaya (05/10) — Pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) ingin ada kepastian hukum dan kejelasan rencana penghentian program bantuan subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat membenarkan bahwa akhir Oktober 2021 nanti akan menjadi batas akhir pengajuan dana FLPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Menurut Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 27 Oktober 2021 akan menjadi batas akhir pengajuan dana FLPP. Sedangkan pencairannya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober,” ucap Politisi PKS.

Toriq menyebutkan,

selanjutnya akan ada transisi pemindahan Pusat Pengelolaan PPDPP KemenPUPR ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang ditargetkan bisa selesai pada akhir tahun ini.

“Program FLPP bisa diteruskan atau diganti dengan program lain seperti BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis tabungan atau yang lainnya. Memang harus segera ada kejelasan dari pemerintah. Pengembang dan konsumen tidak boleh dibuat bingung,” ujarnya.

Toriq sangat mengerti jika pengurus Apersi menginginkan kepastian hukum dan kejelasan

tentang rencana penghentian skema FLPP. Karena kalau program ini terhenti, timbul kekhawatiran akan nasib pengembang yang sudah membangun rumah dan siap akad dengan konsumen.

“Kasihlah konsumen, ketika sudah menyiapkan dengan skema FLPP tetapi berubah jadi skema lainnya. Maka harus merubah semua persyaratan. Hal ini bagi konsumen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sangat memberatkan,” sebutnya.

Oleh karenanya Toriq meminta kepada PPDPP KemenPUPR agar segera merespon keinginan pengurus Asiri tersebut. Sebelum tenggat waktu penghentian skema FLPP. Sehingga pelaksanaan di lapangan jelas, bila program tersebut disetop Oktober.

“Pasalnya KPR bersubsidi masih sangat diminati masyarakat, khususnya MBR. Bahkan dimasa pandemi. Hal ini memberikan dampak positif bagi sektor lainnya, dan bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tuturnya.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi V DPR RI

“Program FLPP bisa diteruskan atau diganti dengan program lain seperti BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis tabungan atau yang lainnya. Memang harus segera ada kejelasan dari pemerintah. Pengembang dan konsumen tidak boleh dibuat bingung,”

Aleg PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi di Perbatasan

KUTIPAN

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil dalam RAPBN 2022.

Hal itu diungkapkan Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang membahas sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) RAPBN 2022, Rabu (29/09).

Dalam RDP tersebut Sigit mengatakan fasilitas sarana dan prasarana transportasi di daerah perbatasan masih sangat minim. Bahkan beberapa diantaranya membahayakan penumpang.

"Kami pernah mendatangi

sebuah pelabuhan penumpang di daerah Morotai, Maluku Utara. Kondisi pelabuhan sangat memprihatikan. Ada yang pelabuhan terlalu rendah atau terlalu tinggi dari kapalnya sehingga menyulitkan penumpang untuk naik. Bahkan sampai harus merangkak. Ini sangat tidak nyaman membahayakan penumpang," kata Sigit.

Selain kondisi pelabuhan yang membahayakan dan minim fasilitas, Sigit juga mengkritik bantuan bus untuk daerah perbatasan dan terpencil yang dinilainya tidak layak.

"Kami pernah berkunjung ke daerah perbatasan dan terpencil yang mendapatkan bantuan bus. Tapi, bus yang diberikan sangat tidak layak. Seperti

metromini. Seharusnya bus bantuan yang diberikan kualitasnya lebih baik," kata Sigit.

Untuk itu, dalam RKA KL RAPBN 2022, Sigit mendesak pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memperhatikan lebih pada pemenuhan sarana dan prasarana transportasi di daerah terpencil dan perbatasan.

Menanggapi usulan Sigit Sosiantomo, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemenhub Djoko Sasono berjanji akan lebih memperhatikan pemenuhan infrastruktur transportasi di daerah perbatasan dan terpencil.

"Kami akan memperhatikan saran dan usulan dari Pak Sigit Sosiantomo untuk lebih memprioritaskan daerah perbatasan dan ini akan menjadi catatan kami," kata Djoko dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Seperti diketahui, dalam RKA KL RAPBN 2022, Kemenhub mendapat alokasi anggaran sebesar Rp32,938 Triliun. Dari jumlah tersebut, 65,7% atau sebesar Rp21,64 Triliun digunakan untuk mem-



I. H. SIGIT SOSIANTOMO
Anggota Komisi V DPR RI

"Kami pernah mendatangi sebuah pelabuhan penumpang di daerah Morotai, Maluku Utara. Kondisi pelabuhan sangat memprihatikan. Ada yang pelabuhan terlalu rendah atau terlalu tinggi dari kapalnya sehingga menyulitkan penumpang untuk naik. Bahkan sampai harus merangkak. Ini sangat tidak nyaman membahayakan penumpang

biayai infrastruktur konektivitas.

Untuk transportasi laut, alokasi anggaran yang diberikan dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2,3 Triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki dan membangun pelabuhan di 47 lokasi.

Sedangkan untuk transportasi darat di daerah perbatasan hanya mendapat alokasi sebesar Rp144,9 miliar. Sementara untuk subsidi operasional angkutan perintis pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,09 Triliun.

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Peringati Hari Batik, Mahfudz: Kebanggaan Bangsa yang **Harus Terus Dikembangkan**

KUTIPAN

Bekasi (05/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman menanggapi peringatan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober.

Mahfudz mengingatkan, dalam sejarahnya pada tanggal 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya tak benda atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.

"Penetapan ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa batik merupakan budaya asli Indonesia. Sebuah pengakuan resmi secara Global bahwa batik Batik adalah Produk asli anak bangsa Indonesia, yang secara turun temurun diwarisi hingga sekarang. Kita sebagai generasi penerus harus bangga sekaligus berupaya menjaga dan mempertahankannya. Dan kita harus mampu mengenalkan Batik dengan banyak ragamnya kepada dunia luar," demikian disampaikan Mahfudz Abdurrahman di Jakarta.

Peringatan hari Batik, imbuahnya, harus dimaknai sebagai momentum untuk menyebarkan Kembali semangat dan kebanggaan kita kepada salah satu hasil karya orisinal bangsa ini.

"Sebuah karya yang dihasilkan dari perjalanan panjang sebuah bangsa, menjadi saksi sejarah berdirinya negeri ini. Kita harus terus melindungi dan mengembangkannya agar karya seni ini mampu mengikuti tuntutan zaman tanpa harus melepas akar orisinalitas. Pemerintah dan semua stakeholder terkait harus terus memberikan dukungan nyata supaya batik tetap eksis, tidak malah tergusur dari produk negara lain". Ucap Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Selanjutnya Mahfudz Abdurrahman menyatakan

bahwa menggunakan batik merupakan kebanggaan tersendiri.

"Saya penggemar Batik dengan segala macam corak dan motifnya dan saya bangga saat mengenakan pakaian khas ini. Saya yakin jutaan anak bangsa memiliki perasaan yang sama dengan saya," ungkapnya.

Dengan kita mengenakan batik, tambahannya, kita membantu para perajin pakaian ini, yang tentu saja akan mengairahkan mereka untuk memproduksinya. Motif dan corak batik sangat beragam, serta mewakili berbagai daerah dan etnik di nusantara.

"Pemerintah harus memberikan dukungan nyata dengan kebijakan strategis, baik dalam ketersediaan bahan baku, perlindungan Hak Paten, membantu dalam akses permodalan dan pasar. Kita menyadari industri batik ada dalam banyak tingkatan. Dari skala rumahan hingga pabrik dengan masing-masing karakteristiknya," papar Anggota DPR asal Dapil Bekasi ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos
Anggota Komisi VI DPR RI

"Tidak adanya pameran atau peragaan busana selama pandemi ini, menambah turunya produksi karya seni yang kita banggakan ini. Berbagai pihak terkait harus memberikan pendampingan dan advokasi kepada para perajin batik. Agar industri batik kita tetap bisa bertahan dan berekspansi ke pasar dunia,"

Politisi PKS Minta Sektor E-Commerce Berikan Prioritas Produk UMKM Dalam Negeri

KUTIPAN

Jakarta (24/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Komisi VI, Nevi Zuairina saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI Dengan CEO Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Gofood menyampaikan agar kedepannya, ada prioritas besar bagi pelaku usaha UMKM dalam negeri, dalam berbagai platform pasar digital.

Nevi menilai, dimasa depan, e-commerce akan menjadi terdepan dibandingkan dengan pola perdagangan konvensional. Pandangan anggota DPR ini relevan dengan prediksi Kementerian Perdagangan yang memperkirakan nilai perdagangan e-commerce di Indonesia semakin meningkat untuk produk utama dalam 5 tahun ke depan. Bahkan transaksi perdagangan e-commerce pada tahun 2023 meningkat sebesar 32,4% dari tahun 2019.

"Saya berharap, pemilik marketplace dapat berperan besar dalam mendorong para pelaku usaha khususnya UMKM

untuk melakukan digitalisasi. Jangan sampai ada praktik monopoli. Barang penjualan online dan juga pelaku UMKM dalam negeri mesti dapat perlindungan. Tidak boleh pelaku UMKM dalam negeri tersisihkan produknya karena produk-produk luar negeri," jelas Nevi. Legislatur asal Sumatera Barat ini berpandangan, yang berawal dari keluhan masyarakat pelaku UMKM di daerah pemilihannya, bahwa saat ini untuk dapat produk dari luar negeri sangat mudah dengan maraknya marketplace.

Menurutnya, Bila memang produk dari luar itu sungguh

tidak diproduksi di dalam negeri, tentu tidak menjadi masalah bahkan mungkin sebagian pihak merasa dimudahkan. Akan tetapi, ada produk-produk yang seharusnya mampu diproduksi dalam negeri seperti kerajinan, aksesoris atau pakaian, para pelakunya mesti dapat kemudahan dengan beberapa prioritas promosi.

Nevi menegaskan, pemerintah dengan segala perangkatnya dapat memberi kesempatan barang on line luar negeri dimana dalam negeri tidak atau belum mampu produksi, mesti di arahkan ke gernas BBI (Bangga Buatan Indonesia) sehingga marketplace melakukan transfer knowledge ke pelaku UMKM agar dapat memproduksi barang tersebut oleh pelaku UMKM dalam negeri.

"Sering kami mendapat laporan, dengan produk yang mirip dengan kualitas sama, produk lokal kalah bersaing pada persoalan harga. Kerap dijumpai, produk luar lebih murah sehingga rakyat Indonesia yang merupakan potensi pasar yang sangat besar



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Saya berharap, pemilik marketplace dapat berperan besar dalam mendorong para pelaku usaha khususnya UMKM untuk melakukan digitalisasi. Jangan sampai ada praktik monopoli. Barang penjualan online dan juga pelaku UMKM dalam negeri mesti dapat perlindungan. Tidak boleh pelaku UMKM dalam negeri tersisihkan produknya karena produk-produk luar negeri

cenderung memilih produk luar ini. Peran Marketplace ini yang mestinya mampu memberikan keberpihakannya pada UMKM dalam negeri", ujar Nevi.

Politisi PKS ini juga menyinggung, agar data pribadi masyarakat yang teregistrasi ke berbagai marketplace, pemerintah

agar secepatnya membuat regulasi untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi warga Indonesia. Hal ini seiring dengan Persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Desak Pemerintah Awasi Ketat Penerapan TKDN Baja Konstruksi

KUTIPAN

Jakarta (22/09) — BPS mencatat, impor baja pada semester I-2021 meningkat 51,18% atau mencapai US\$ 5,36 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak khawatir kenaikan volume impor besi dan baja akan terus berlanjut sepanjang tahun 2021.

Amin pun mendesak Pemerintah mengambil langkah tegas dalam hal pengawasan penggunaan baja impor.

Untuk mengatasi dampak negatif terhadap industri nasional, ketentuan mengenai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) khususnya besi dan baja seharusnya dipatuhi seluruh pelaksana pekerjaan konstruksi yang dibiayai menggunakan anggaran pemerintah (APBN/ APBD).

"Pengawasan bisa melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dibiayai APBN, APBD, dan BUMN agar program peningkatan TKDN dapat direalisasikan,"

ujarnya.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, defisit neraca perdagangan baja saat ini sangat terkait dengan tiga hal yakni harga, kualitas, dan upaya perlindungan/proteksi terhadap produksi baja dalam negeri.

"Harga jual baja produksi Industri dalam negeri kalah bersaing dengan baja impor seperti baja asal China dan Vietnam. Baja impor asal China misalnya, harganya 28% lebih murah dibandingkan baja dalam negeri," terang Amin.

Mengapa harga baja China lebih murah?, imbuh Amin, Pertama, pemerintah China memberikan insentif berupa potongan pajak (tax rebate) bagi pengusaha yang melakukan

ekspor yang besarnya mencapai 13-15%. Ekspor ini ditujukan kepada pengusaha yang mengekspor baja paduan (alloy).

"Baja paduan sendiri ialah baja khusus yang biasanya digunakan untuk rel kereta api, komponen alat berat, dan lain-lain," jelasnya.

Kedua, lanjut Amin, Pemerintah menerapkan kebijakan bebas bea masuk impor baja paduan karena Indonesia belum bisa memproduksi baja paduan. Ketiga, sebagian bahan baku industri baja di dalam negeri masih harus dipenuhi dari impor sehingga berdampak pada biaya produksi dan harga jual yang tinggi.

"Saat ini industri baja dalam negeri terutama Krakatau Steel mengimpor bahan baku industri baja berupa slab, billet, dan bloom yang volumenya mencapai 3 juta ton," terang Amin.

Mengenai rendahnya daya beli lokal dari sisi kualitas, imbuh Amin, hal itu terkait erat dengan penguasaan teknologi yang tertinggal dibandingkan sejumlah negara produsen baja seperti China dan Vietnam.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

“Untuk mengatasi dampak negatif terhadap industri nasional, ketentuan mengenai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) khususnya besi dan baja seharusnya dipatuhi seluruh pelaksana pekerjaan konstruksi yang dibiayai menggunakan anggaran pemerintah (APBN/ APBD).”

memperingati
Maulid Nabi
MUHAMMAD ﷺ
12 Rabi'ul awwal 1443 H / 19 Oktober 2021



Membela Kehormatan Rasulullah ﷺ

Ahad, 01 November 2020 / 16 Rabiul Awwal 1442H

Pukul 20.00 - 22.00 WIB

DISIARKAN SECARA LIVESTREAMING

PKS TV

PKS

Teladan

Nabi Muhammad
dalam Melayani
& Membela Umat

Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Sekretaris Jenderal PKS

Kunjungan Kerja ke PT PGN Area Tangerang, Rofik **Dukung** Program PGN Sayang Ibu

KUTIPAN

Tangerang (01/10) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menilai Program Perusahaan Gas Negara (PGN) Sayang Ibu yang dilakukan di PGN di wilayah Tangerang, harus terus dikembangkan di daerah lain.

"Kalau program PGN Sayang Ibu ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tangerang maka program ini bisa dikembangkan di tempat lain," katanya saat mengikuti Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Area Tangerang PT PGN (Tbk), Kamis (30/09/2021).

Dalam kesempatan itu, dia menanyakan perkembangan program PGN Sayang Ibu dan persentase target yang sudah dicapai. Dia juga menanyakan sejauh mana keterlibatan pihak swasta dalam program tersebut.

Rofik terus mendorong pemanfaatan energi bersih, aman dan ramah lingkungan erta efisien

"Kami terus mendorong agar pemanfaatan energi gas bumi yang bersih, aman dan ramah lingkungan terus digalakan, apalagi dengan adanya program jargas ini mampu membantu mengurangi pengeluaran belanja rumah tangga masyarakat karena lebih efisien," pungkask Rofik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 direncanakan terdapat lebih dari 4 juta Sambungan Rumah (SR) jaringan gas pada tahun 2024.

Direktur Komersial PT PGN Tbk Fariz Aziz menjelaskan, total jaringan gas (jargas) rumah tangga PT PGN area Tangerang 8.718 SR. Terdiri dari 251 SR rumah susun dan 8.467 SR rumah tangga.

"Sedangkan calon pelanggan Gaskita program PGN Sayang Ibu di Area Tangerang sebanyak 38.038 SR. Pelanggan eksisting dan calon pelanggan penetrasi ada di 22 wilayah. Sedangkan calon pelanggan pengembangan tersebar di 34 wilayah," jelasnya.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. memulai uji pasar Gaskita yang merupakan bagian dari Program PGN Sayang Ibu di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang guna memperluas pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil.

Adapun uji pasar Gaskita dilakukan di Malaka Sari, Jakarta Timur pada Selasa (21/9/2021) yang diresmikan oleh Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) M. Haryo Yunianto dan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati.

Haryo mengatakan, untuk di Jakarta PGN baru melayani sekitar 7 persen dari total potensi pelanggan rumah tangga.

Dia menuturkan, PGN baru



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Kalau program PGN Sayang Ibu ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tangerang maka program ini bisa dikembangkan di tempat lain,"

melayani 15.012 sambungan rumah (SR) pelanggan existing dan masih terdapat potensi 15.479 SR calon pelanggan gas Gaskita. Harga gas bumi yang ditawarkan untuk pelanggan Gaskita adalah Rp10.000 per meter kubik (m3).

"Uji pasar Program PGN Sayang Ibu Gaskita di Jakarta ini merupakan salah satu pola

pengembangan jargas [jaringan gas] yang dapat dicontoh wilayah lain di Indonesia. PGN siap bekerja sama dengan berbagai pihak dalam proses pembangunan jargas dan mencapai target pemerintah," katanya di Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Minta Pemerintah Evaluasi Komersialisasi Kebun Raya

KUTIPAN

Jakarta (27/09) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Kepada Pemerintah untuk mengevaluasi kerjasama pengelolaan empat kebun raya dengan pihak swasta.

Menurutnya kerjasama itu berpotensi menyimpang dari tujuan utama konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata ilmiah dan jasa lingkungan.

"Tiga fungsi pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan bersama seluruh kebun raya di dunia," pungkasnya.

Karena itu, lanjut Mulyanto, berbagai kegiatan dan program pengembangan kebun raya Indonesia harus selalu berpegang pada kelima tugas dan fungsi kebun raya yang sekaligus sebagai marwah (harga diri) kebun raya.

"Pemerintah harus berpikir masak untuk meng-komersialisasikan kebun raya nasional kita. Jangan sampai gagasan untuk mendapatkan untung

melalui eksploitasi aspek wisata kebun raya malah menuai buntung," tandasnya.

Pemerintah, kata Mulyanto, harus konsisten menjaga tugas dan fungsi kebun raya untuk konservasi, penelitian dan pendidikan.

"Ini tugas yang berat dan penting karena kita adalah negara yang terletak di garis Khatulistiwa dengan keragaman hayati yang sangat kaya. Sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menjaga Kekayaan SDA yang dikuasai oleh negara", tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) harus mempertimbangkan masukan dari para ahli, terkait dampak dari

komersialisasi kebun raya ini.

"Pemerintah jangan kehabisan ide dalam pengembangan aspek konservasi, riset dan pendidikan kebun raya apalagi dengan mengorbankan visi jangka panjangnya untuk keuntungan jangka pendek yang tidak seberapa," seru mantan peneliti ini.

Sebelumnya diketahui BRIN, melakukan kerjasama pengelolaan empat kebun raya kepada pihak swasta. Dengan kerjasama ini pengelolaan Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali akan diserahkan ke PT. Mitra Natuna Raya (MNR)

Nantinya pihak MNR akan maksimalkan fungsi wisata dan pendidikan kebun raya dengan berbagai atraksi hiburan. MNR akan menyiapkan tur kebun raya malam hari, sebagai mana di Singapura dengan memanfaatkan lumina tenaga laser.

Mulyanto minta BRIN berhati-hati melakukan kerjasama pengelolaan ini.

"Jangan sampai aset bangsa yang sudah berusia 2 abad ini rusak hanya karena kepentingan komersil sesaat," tegas Mulyanto.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah harus konsisten menjaga tugas dan fungsi kebun raya untuk konservasi, penelitian dan pendidikan. Ini tugas yang berat dan penting karena kita adalah negara yang terletak di garis Khatulistiwa dengan keragaman hayati yang sangat kaya. Sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menjaga Kekayaan SDA yang dikuasai oleh negara"

Dukung Program Bansos, Bukhori Kawal Usulan Anggaran Kemensos hingga Disetujui Kemenkeu

KUTIPAN

Kendal (25/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendukung penuh kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Mensos Risma) terkait program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Bukhori mengapresiasi Mensos Risma yang memiliki inisiatif untuk memberikan bansos bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga mendorong Komisi VIII DPR RI memberikan prioritas dukungan bagi Kementerian Sosial (Kemensos).

"Yang menarik untuk kali ini adalah kita bersepakat dengan Kemenas untuk memberikan bantuan bagi anak yatim," kata Bukhori saat penyaluran bantuan ATENSI bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, di GOR Sasana Krida Bahurekso, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/09/2021).

Dia menjelaskan, rincian

program ini adalah masing-masing anak yatim yang terdaftar sudah sekolah akan menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu dan yang belum sekolah akan memperoleh Rp300 ribu. Sementara, bagi Kabupaten Kendal sendiri sudah tersalur sekitar 70 dari kuota 700 anak penerima manfaat.

Legislator dapil Jateng 1 ini mengungkapkan, pada tahun 2022 bantuan tersebut rencananya akan diperluas sehingga tidak hanya menjamah anak yatim piatu imbas Covid-19, tetapi juga menyasar anak yatim piatu pada umumnya.

"Kita berharap pada tahun

2022 semua anak yatim di Indonesia mendapatkan bantuan. Kita telah alokasikan anggaran untuk kurang lebih bagi kuota 5 juta anak yatim," terang Bukhori.

Kemensos sebelumnya mengusulkan anggaran Rp 11,64 triliun untuk 3.453.128 anak yatim piatu usia sekolah dan 963.855 anak yatim piatu yang belum sekolah.

Meski telah didukung penuh oleh Komisi VIII DPR RI, sayangnya usulan anggaran tersebut belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Oleh karena itu, Anggota Komisi Sosial DPR ini menegaskan Komisi VIII DPR RI akan mengawal hingga usulan tersebut disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"DPR dan Mensos telah bersepakat ihwal bantuan bagi anak yatim ini. Konsekuensinya, kami tidak akan sebatas memberikan dukungan normatif, melainkan proaktif mengawal proses pengusulan anggaran ini hingga Kemenkeu



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

"DPR dan Mensos telah bersepakat ihwal bantuan bagi anak yatim ini. Konsekuensinya, kami tidak akan sebatas memberikan dukungan normatif, melainkan proaktif mengawal proses pengusulan anggaran ini hingga Kemenkeu menyetujui"

menyetujui," tegasnya.

Sebagai informasi, sebanyak 38.000 anak telah terdata untuk menerima bansos anak yatim piatu per 23 September 2021.

Selanjutnya, sebanyak 28.000 anak telah divalidasi

sementara 10.000 lainnya sedang dilakukan pendataan ulang. Kemudian, sebanyak 4500 anak dilaporkan sudah dilakukan pembukaan rekening, sedangkan untuk pencairan dana baru mencapai 2000 anak.

Nur Azizah: Maraknya Fenomena LGBT Merusak Moral Bangsa

KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nur azizah Tamhid, B.A., M.A. sebutkan keberadaan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia bertentangan dengan Ideologi Negara

Menurutnya, dalam sila pertama Pancasila disebutkan bahwa rakyat Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kita menggunakan Norma Agama dalam bermasyarakat di NKRI.

“Perilaku LGBT tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Norma Agama di Indonesia, karena menyalahi kodrat sebagai manusia. Tidak ada satu pun Agama di Indonesia yang mewajarkan fenomena LGBT. Jelas, maraknya fenomena LGBT ini justru dapat merusak moral anak bangsa.”, katanya.

Saat di temui di kediamannya, di Wilayah Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, pada Kamis (23/9), Nur Azizah menuturkan, fenomena LGBT di Indonesia saat ini telah

menjadi gerakan yang massif dan dapat dikategorikan berbahaya di Indonesia. LGBT kini semakin banyak dikampanyekan di berbagai platform media masa dan menyasar generasi muda. Bahaya LGBT mengancam karena propaganda LGBT menjadi gerbang terjadinya berbagai macam penyimpangan sosial di masyarakat.

“Selain itu, secara medis perilaku LGBT ini menjadi salah satu faktor utama maraknya penyakit menular seksual serta HIV-AIDS. Akan tetapi di Indonesia belum ada norma hukum yang mengatur perilaku asusila tersebut”, imbuhnya.

Perilaku LGBT tidak hanya berhenti pada Gerakan ideologi dan aksi semata, akan tetapi telah gencar membuat diskusi

dan kajian tentang LGBT dan diikuti oleh kelompok yang pro maupun yang kontra di berbagai forum ilmiah dengan dalih Hak Asasi Manusia. Pelecehan secara verbal, kekerasan fisik serta perilaku kasar terhadap kelompok LGBT, dengan mengarahkan Gerakan asusila tersebut sebagai pelanggaran HAM, dan mengajak masyarakat untuk ikut membelas pelaku LGBT agar di legitimasi oleh negara.

Menurut Nur Azizah, para pelaku LGBT ini secara massif membangun berbagai upaya kolektif untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak hukum atas disorientasi perilaku seksualnya yang menyimpang dengan memunculkan pembelaan dan advokasi dari berbagai kalangan, baik perorangan maupun kelembagaan yang secara aktif dikampanyekan di media sosial, untuk mengajak dan menyebarluaskan paham serta menggali dukungan mencari celah hukum. Hal ini kerap kali disebut sebagai kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Para pelaku LGBT ini secara massif membangun berbagai upaya kolektif untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak hukum atas disorientasi perilaku seksualnya yang menyimpang dengan memunculkan pembelaan dan advokasi dari berbagai kalangan, baik perorangan maupun kelembagaan yang secara aktif dikampanyekan di media sosial, untuk mengajak dan menyebarluaskan paham serta menggali dukungan mencari celah hukum. Hal ini kerap kali disebut sebagai kebebasan berekspresi dan berpendapat”

Kritisi Mensos Risma yang Marah-Marah Lagi

HNW: **Pendataan** Tanggungjawab bersama Pemda dan Kemensos

KUTIPAN

Jakarta (02/10) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi kembali marah-marahnya Mensos Risma di depan publik, kali ini bahkan marah besar pada saat melakukan kunjungan rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait pendataan dan distribusi bantuan sosial.

HNW mengingatkan Mensos bahwa di MPR ada TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih berlaku, dan seorang Menteri harusnya menjadi bagian dari pejabat yang memberikan teladan dalam menjalankan Etika tersebut.

Hidayat menilai, meluapkan kemarahan di depan publik sebagaimana dilakukan Risma tidak sesuai dengan Etika Pemerintahan dalam TAP MPR, apalagi kejadian tersebut langsung mengundang kecaman dari Gubernur Gorontalo dan masyarakat luas.

HNW mendesak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau bahkan Presiden sebagai atasan Menteri Sosial memberikan teguran langsung kepada Mensos, untuk menenangkan kekecewaan atau keresahan yang muncul di masyarakat, dan agar kejadian serupa tak berulang pada kemudian hari.

“Mensos sudah pernah marah-marah di depan publik, setidaknya kepada pejabat Pemerintah di Jember, Bandung, Riau, dan kini di Gorontalo. Mengang data bansos bermasalah di daerah perlu diperbaiki, tapi tentunya

tidak dengan marah-marah yang tidak menyelesaikan masalah, bisa dengan cara yang lebih elegan, apalagi yang harus bertanggung jawab bukan hanya Pemda, melainkan juga Kemensos. Mestinya Mensos membimbing dan memberikan teladan terbaik bagaimana menyelesaikan masalah dengan komprehensif, tanpa marah-marah yang malah menambah masalah, dan mengurangi hormat dan marwah,” disampaikan HNW dalam keterangannya di Jakarta (02/10).

Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII sebagai mitra Kementerian Sosial ini menilai, permasalahan data bantuan sosial memang harus segera diselesaikan, dan itu diperlukan kerja sama yang kondusif, karena tanggung jawabnya tidak hanya ada pada pemerintah daerah, melainkan juga Kemensos.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah menyampaikan pendataan atau perubahan data kepada Kementerian Sosial, lalu Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi dan data



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Sikap marah-marah di depan publik justru rawan memperuncing hubungan antara pusat dan daerah, bahkan Gubernur Gorontalo misalnya sampai tersinggung dan minta Presiden mengevaluasi sikap Mensos. Padahal dalam konteks pendataan fakir miskin, sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama menuju data yang lengkap dan tepat, berdaya guna, dan efektif menjauhkan dari penyimpangan termasuk korupsi,”

tersebut ditetapkan oleh Menteri serta menjadi tanggung jawab Menteri.

HNW melihat Kementerian Sosial juga belum maksimal

menjalankan tugasnya terkait verifikasi data Pemda.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



#Tetap
**Jaga
Prokes**

Indonesia
Mulai Membaik

Terima Kasih
#Nakes Pahlawan
Bangsa

Aleg PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Antigen/PCR sebagai Syarat Penerbangan

KUTIPAN

Jakarta (25/09) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang harga untuk tes PCR/Antigen yang masih mahal serta masa berlaku hasil tes PCR/Antigen untuk syarat perjalanan.

Hal tersebut diungkapkan berkenaan dengan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta.

"Banyak juga ya masyarakat yang berkeluh kesah karena hasil Swab PCR hanya berlaku 2X24 Jam, padahal mereka sudah mengeluarkan biaya mahal, dan ada juga yang karena sudah tidak berlaku beberapa jam dia harus Swab PCR atau Antigen Ulang" Ucap Alifudin, Bandara Soekarno-Hatta, Jum'at (24/09/2021).

Sebelumnya pemerintah menetapkan batas waktu hasil test Swab PCR sebagai syarat perjalanan dalam aturan PPKM. Mengingat syarat swab PCR

untuk daerah kategori PPKM level 4 dan level 3 hanya berlaku selama 2x24 jam, terhitung sejak sample Swab PCR untuk luar pulau Jawa & Bali atau Antigen 1x24 jam untuk dalam pulau Jawa-Bali diambil, bukan ketika keluar Hasil Tes PCR/Antigen.

"Misalnya hasil tes PCR, jika mengikuti himbauan presiden dengan harga 500 ribu, itu kita menunggu 1 hari untuk keluar hasilnya, berarti hasil tes PCR itu hanya berlaku 1 hari, karena menunggu 1 hari dari tes samplingnya, tapi yang menarik, jika mau cepat ada yang sameday ada yang expres, itu harga lebih mahal," Tambah Alifudin.

Ketua BPW Kalimantan

DPP PKS ini pun menambahkan, terkadang jadwal maskapai saat ini tidak sesuai dengan jadwal, karena kendala dan permasalahan teknis yang mungkin terjadi, yang akhirnya membuat masyarakat harus melakukan Swab PCR/Antigen ulang dan kembali merogoh koceknya ketika terjadi perubahan melewati masa berlaku swab PCR/Antigen.

"Jika ada rakyat yang sedang tertimpa musibah yang akhirnya menjadi kedaruratan juga harus difikirkan, alangkah baiknya pemerintah mengkaji ulang harga, apalagi disubsidi oleh pemerintah, agar program 3T juga sesuai targetnya" Tutur Bang Alif sapaan akrabnya.

Bang Alif pun menegaskan bahwa, hasil tes Swab PCR/Antigen baiknya bisa sampai 4X24 jam atau bahkan 7X24 jam, namun harus ada persyaratan khusus, seperti orang tersebut sudah di vaksin dosis ke dua, atau bisa dengan syarat lain yang nantinya pemerintah bisa mengkaji lebih lanjut dari keluhan masyarakat ini.

Swab adalah cara untuk memperoleh bahan

**H. ALIFUDIN, S.E.,M.M**

Anggota Komisi IX DPR RI

“Banyak juga ya masyarakat yang berkeluh kesah karena hasil Swab PCR hanya berlaku 2X24 Jam, padahal mereka sudah mengeluarkan biaya mahal, dan ada juga yang karena sudah tidak berlaku beberapa jam dia harus Swab PCR atau Antigen Ulang”

pemeriksaan (sampel). Dimana Swab dilakukan pada nasofaring dan atau orofarings. Pengambilan ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofarings dan atau orofarings

dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Metode ini jugalah yang direkomendasikan WHO untuk mendeteksi Covid-19.

Aleg FPKS Minta Realisasi Penempatan PMI ke Korsel dan Taiwan **Dipercepat**

KUTIPAN

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Kurniasih Mufidayati menyampaikan dirinya mendapat banyak aspirasi dari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang masih menunggu penempatan khususnya ke Korea Selatan dan Taiwan.

Mufida menyebut banyak diantara CPMI yang harus menunggu hingga dua tahun lebih namun belum ada kejelasan penempatan oleh Kementerian Tenaga Kerja maupun Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) khususnya ke dua negara tersebut.

"Banyak sekali teman-teman CPMI yang menitipkan aspirasi untuk meminta kejelasan dan keberpihakan dibuka kembalinya penempatan PMI ke Korsel dan Taiwan, terlebih saat ini kondisi kasus konfirmasi positif harian di Indonesia sedang rendah. Korsel dan Taiwan sempat menghentikan penerimaan PMI karena kasus Covid di Indonesia tengah tinggi. Saatnya mulai dibuka kesempatan teman-

teman untuk berangkat ke Korsel atau Taiwan," sebut Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Mufida menyebut, banyak diantara CPMI yang melaporkan ke dirinya jika masa penunggunya hingga habis perjanjian kerja (SLC) maupun sertifikat Employment Permit System – Test of Proficiency in Korea yang berlaku dua tahun dan akhirnya habis karena penutupan keberangkatan.

"Keinginan teman-teman CPMI untuk berangkat bekerja ke Korsel terutama sangat kuat. Satu yang sering jadi kendala adalah biaya karantina yang dibebankan ke perusahaan di Korsel. Guna mengatasi ini bahkan teman-teman CPMI bersedia menanggung biaya karantina. Artinya kebutuhan

CPMI untuk berangkat sangat urgen. Aspirasi teman-teman ini seharusnya menjadi dasar bagi pembicaraan negosiasi antarpemerintah," urainya.

Pembina Sahabat Pekerja Migran ini menyebut, CPMI tujuan Taiwan juga menagih janji pemerintah yang menyebut penempatan PMI ke Taiwan dimungkinkan jika kasus Covid-19 harian di Indonesia sudah berada di bawah 5.000 dalam satu pekan.

"Menurut data Kemenkes, kasus harian pada 19-26 September 2021, kasus konfirmasi harian sudah di bawah 4.000. Jadi ini juga jadi saat yang tepat untuk memulai pembicaraan penempatan PMI ke Taiwan," ungkap Mufida.

Mufida juga menyebut, Kemenaker sendiri telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No 3/2748/PK.02.02/2021 tentang Perubahan Kelima Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang berlaku 16 Agustus 2021 yang sudah menamatkan

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

“Keinginan teman-teman CPMI untuk berangkat bekerja ke Korsel terutama sangat kuat. Satu yang sering jadi kendala adalah biaya karantina yang dibebankan ke perusahaan di Korsel. Guna mengatasi ini bahkan teman-teman CPMI bersedia menanggung biaya karantina. Artinya kebutuhan CPMI untuk berangkat sangat urgen. Aspirasi teman-teman ini seharusnya menjadi dasar bagi pembicaraan negosiasi antarpemerintah,”

Korea Selatan dan Jepang sebagai destinasi penempatan yang sudah diperbolehkan.

"Tinggal tindak-lanjut teknis untuk keberangkatan seharusnya. Apalagi Duta Besar

Korsel sudah bertemu BPPMI dan membahas rencana penempatan PMI ke Korsel pada Juni lalu.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Prihatin Ancaman Stunting Menguat, Akibat Terbelenggu Impor dan Krisis Petani

KUTIPAN

Jakarta (30/09) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, meminta pemerintah agar mengurangi belenggu impor bahan makanan pokok untuk mencegah ancaman stunting.

"Upaya menurunkan angka stunting di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dari berbagai sisi, termasuk langkah penyediaan bahan pangan tinggi gizi secara mudah dan murah," ujar Netty dalam keterangan media, Kamis, (30/09/2021)

Kesejahteraan rakyat, kata Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini, sulit tercipta jika pemerintah masih bergantungan pada impor bahan pangan.

Menurut data BPS, dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2021, Indonesia mengimpor lebih dari 15 juta ton bahan pokok senilai US\$ 8,37 miliar atau setara dengan Rp 118,9 triliun. Menurut sumber yang sama, untuk komoditas jagung sepanjang

Januari-Agustus sudah impor sebanyak 592.101,7 ton, sedangkan impor ikan segar sebanyak 507,8 ton.

"Kita seharusnya prihatin dan sedih dengan kondisi ini. Pemerintah harus mencari akar masalahnya, mengapa dengan luas laut mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia masih bergantung pada impor ikan. Seharusnya potensi ini digali dan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan," ungkapnya.

Kondisi tingginya impor bahan pangan Indonesia ini menurut Wakil Ketua Fraksi PKS, semakin mengancam angka stunting di Indonesia.

"Indonesia berpotensi

kekurangan pangan jika tidak segera membangun kemandirian pangan. Ini dapat menjadi ancaman serius bagi penurunan stunting yang saat ini kita menjadi juara keempat dunia. Harusnya pemerintah lebih memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan petani, tidak hanya sebatas swasembada pangan tapi juga harus diikuti dengan swasembada gizi" katanya.

Netty meminta pemerintah memaknai momentum Hari Tani Nasional 24 September 2021 untuk membangun komitmen dan aksi membahagiakan petani.

"Kita seharusnya membahagiakan petani dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber pangan dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan. Tanah kita kaya akan sumber bahan pangan, seperti, jagung, ubi kayu atau singkong, beras, kentang, kopi, teh hingga cengkeh," katanya.

Selain itu, Netty mengingatkan pemerintah agar memberdayakan petani dan menyejahterakan kehidupan mereka agar kemandirian



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Kita seharusnya membahagiakan petani dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber pangan dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan. Tanah kita kaya akan sumber bahan pangan, seperti, jagung, ubi kayu atau singkong, beras, kentang, kopi, teh hingga cengkeh,"

pangan tercapai dan ancaman stunting dapat dicegah.

"Jangan sampai Indonesia negara agraris akhirnya kehilangan petani karena turunnya minat generasi muda untuk

menjadi petani," katanya.

Data BPS tahun 2013 sampai 2020 telah terjadi penurunan drastis petani muda usia 25-34 tahun yang tersedia hanya sekitar 2,9 juta.

Klaster PTM Bermunculan, Legislator: **Percepat** Vaksinasi Guru

KUTIPAN

Politikus PKS itu juga mengimbau agar pemerintah tidak instruktif terkait kebijakan penyelenggaraan PTM, melainkan fasilitatif. Dengan demikian kehadiran negara dapat lebih dirasakan.

Jakarta (25/09) — Sebanyak 2,78 persen satuan pendidikan atau sebanyak 1.296 sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi klaster Covid-19.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan, agar vaksinasi terhadap guru tetap diprioritaskan dan dipercepat.

"Kalau yang lain saja diprioritaskan, menurut saya secara pribadi guru menjadi prioritas utama kalau pembelajaran tatap muka mau diadakan," kata Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9).

Menurutnya, guru rentan terpapar Covid-19 mengingat usia dan komorbid. Sehingga kalau ada pelanggaran syarat melakukan PTM, vaksinasi guru tetap harus diutamakan.

"Guru dan tenaga pendidikan menurut saya diutamakan, disegerakan, didahulukan, diprioritaskan," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan agar pihak sekolah berkoordinasi dengan tim Covid-19 di daerah masing-masing. Jangan sampai pembukaan berjalan berjalan sendiri-sendiri. "Jangan kendur koordinasi dengan tim Covid," tuturnya.

Politikus PKS itu juga mengimbau agar pemerintah tidak instruktif terkait kebijakan penyelenggaraan PTM, melainkan fasilitatif. Dengan demikian kehadiran negara dapat lebih dirasakan.

"Kekurangannya apa, apakah infrastruktur sarana dan prasarana masih kurang dan seterusnya, maka bisa

nggak diaksasikan, masih ada nggak anggarannya. Kalau bisa digelontorkan dari pusat kenapa tidak, misalnya," jelasnya.

Kemendikbudristek mengungkapkan hingga 20 September 2021 ada 2,78 persen satuan pendidikan penyelenggara PTM terbatas yang menjadi klaster Covid-19. Jika dilihat dari total jumlah sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas, klaster Covid-19 ada di 1.296 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kasus penularan itu kira-kira 2,8 persen yang melaporkan," ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmien) Kemendikbudristek, Jumeri, dalam diskusi daring yang dikutip dari Youtube, Rabu, (22/9).



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Kalau yang lain saja diprioritaskan, menurut saya secara pribadi guru menjadi prioritas utama kalau pembelajaran tatap muka mau diadakan. guru rentan terpapar Covid-19 mengingat usia dan komorbid. Sehingga kalau ada pelanggaran syarat melakukan PTM, vaksinasi guru tetap harus diutamakan. Guru dan tenaga pendidikan menurut saya diutamakan, disegerakan, didahulukan, diprioritaskan

Aleg PKS Minta Kementerian dan Lembaga Berikan Performa Terbaik dengan Optimalisasi Anggaran

KUTIPAN

Jakarta (25/09) — Dalam Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Rabu 22 September 2021 di Jakarta, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mempertanyakan sistem mekanisme reward dan punishment di kementerian dan lembaga dalam rangka mengoptimalkan sumber daya anggaran yang ada.

Pertanyaan ini diajukan politisi Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

Disamping itu, Anis minta agar anggaran untuk BPD PKS (Badan Pengelola Dana Perkulmpulan Kelapa Sawit) yang mendapat alokasi dukungan manajemen terbesar sejumlah 5,8 Trilyun agar diperjelas rencana penggunaannya, terutama karena belum jelasnya program Moratorium Sawit Pemerintah.

Anis lalu mencermati anggaran yang mencapai Rp

328 Miliar untuk infrastruktur core tax system, tentang sejauh mana otomatisasi sistem perpajakan dapat dilakukan.

"Terlebih, dengan adanya Revisi RUU KUP, maka platform digital akan ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPh dari merchant yang berjualan di platform," ungkapnya.

Anis yang Juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menanyakan sejauh mana otomatisasi sistem perpajakan ini dapat mendukung system TIK Perpajakan.

"Apabila sistem TIK perpajakan tidak cukup baik, maka proses tersebut justru

akan memberatkan UMKM yang berdagang melalui platform, yang pada akhirnya mematikan ekosistem ekonomi digital yang telah ada." Ujar Anis.

Anis yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI kemudian juga memberi catatan terkait upaya pemerintah menjaga kesinambungan pembiayaan.

Untuk itu, Anis meminta Menteri Keuangan menjelaskan strategi pemerintah dalam RKA Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 agar ada kesinambungan pembiayaan dan optimalisasi asset dan investasi untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Kementerian dan lembaga dengan performance buruk karena memiliki tingkat penyerapan rendah terutama untuk belanja modal perlu diberi sanksi. Hal ini perlu dilakukan agar kementerian dan lembaga saling berkompetisi untuk mencapai performa terbaik." demikian pungkasan Anis.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Kementerian dan lembaga dengan performance buruk karena memiliki tingkat penyerapan rendah terutama untuk belanja modal perlu diberi sanksi. Hal ini perlu dilakukan agar kementerian dan lembaga saling berkompetisi untuk mencapai performa terbaik"

RUU KUP **Harus Mengarah** pada Kebijakan Perpajakan yang Berkeadilan

KUTIPAN

Jakarta (28/09) — Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Konferensi Pers mengenai Rancangan Undang-Undang Ketentuan (RUU KUP), Rabu (28/9) di Jakarta. Fraksi PKS menyampaikan penjelasan tentang point-point penting yang diperjuangkan FPKS dalam RUU KUP.

"RUU KUP ini adalah upaya pemerintah untuk mengharmonisasi ketentuan perpajakan yang sudah ada sebelumnya. RUU ini bisa dikatakan mirip dengan Omnibus Law, hanya saja dia berkaitan dengan masalah perpajakan" ujar Ecky Awal Mucharram, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan mewakili sikap resmi Fraksi PKS pada Selasa (28/9/2021) di Jakarta.

Fraksi PKS menolak beberapa ketentuan baru perpajakan dalam RUU KUP, sebagai contoh, adanya rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bertahap sebesar 11% di 2022, dan 12 % di tahun berikutnya. Di sisi lain, pajak penghasilan (PPH) untuk Badan/Perusahaan akan

dikurangi dari 25% menjadi 20%.

Menurut Ecky, kebijakan ini sangat tidak adil karena akan melemahkan daya beli masyarakat dan mengganggu pemulihan ekonomi.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan PPN ini akan melemahkan daya beli masyarakat dan akhirnya mengganggu pemulihan ekonomi. Di sisi lain, beban pajak perusahaan malah dikurangi, bagi kami ini tidak adil" jelas Ecky yang juga Anggota Komisi XI DPR RI.

Fraksi PKS juga menolak adanya skema pengenaan PPN pada sejumlah barang atau jasa yang berkaitan dengan

sembako, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pelayanan keagamaan. Menurut Fraksi PKS pengenaan pajak terhadap barang/jasa tersebut sama sekali tidak adil karena barang/jasa tersebut adalah hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 dan perundang undangan.

Hal yang sama juga berlaku pada rencana perluasan cukai, dimana pemerintah akan mengenakan cukai pada produk plastik, minuman berpemanis dan soda. Menurut Fraksi PKS, skema perluasan cukai tersebut harus ditolak karena pada akhirnya menambah beban rakyat. Apalagi ditengah tengah pandemi saat ini.

Fraksi PKS tetap akan memperjuangkan kebijakan pajak yang berkeadilan dalam RUU KUP. Sebagai contoh meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penduduk berpenghasilan 4,5 juta rupiah menjadi 8 juta rupiah. PKS juga mengusulkan dan memperjuangkan pemberlakuan Penghasilan usaha/omset tidak kena pajak (OTKP) dari wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



H. ECKY AWAL MUCHARRAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

"RUU KUP ini adalah upaya pemerintah untuk mengharmonisasi ketentuan perpajakan yang sudah ada sebelumnya. RUU ini bisa dikatakan mirip dengan Omnibus Law, hanya saja dia berkaitan dengan masalah perpajakan"

(UMKM). Besaran OTKP untuk UMKM sebesar Rp. 1 milyar setahun. Artinya Wajib Pajak UMKM yang omsetnya dibawah

1 M, tidak dikenakan pajak. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan

Sikapi Azis Syamsuddin, Habib Aboe Tegaskan MKD Bertindak Sesuai Aturan

KUTIPAN

Jakarta (26/09) — Komisi antirasuah diketahui menangkap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Sabtu (25/9/2021).

Sebagai sesama legislator di Senayan, Habib Aboe Bakar Alhabsyi yang dari Dapil Kalimantan Selatan ini mengaku turut prihatin atas perkara saudara Azis Syamsuddin di KPK.

Meski begitu, Habib Aboe Bakar yang juga merupakan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini menegaskan akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Diketahui, status Azis Syamsuddin saat ini masih tersangka dan belum terdakwa.

Karena itulah, Habib Aboe menerangkan jika yang bersangkutan belum bisa dilakukan pemberhentian sementara.

"Hal ini merujuk pada ketentuan berdasarkan Pasal 87 Ayat 5 UU MD3, dimana pemberhentian sementara pimpinan DPR, dapat dilakukan jika yang bersangkutan sudah

menjadi terdakwa," ucap Legislator Fraksi PKS Dapil Kalsel itu kepada banjarmasinpost.co.id, Sabtu (25/9/2021) malam.

Namun demikian, menurut ketentuan pasal 87 Ayat 1 huruf B UU MD3, pimpinan DPR dapat diberhentikan dengan sementara apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri.

"Kami memang mendengar di media ada kabar bahwa saudara Azis Syamsuddin menyatakan mengundurkan diri ke partainya. Namun sampai saat ini MKD belum menerima berkas tersebut. Sehingga kita belum bisa mengambil langkah hukum," terang Habib Aboe.

Jika memang Saudara Azis Syamsuddin menyatakan pengunduran diri ke Partai Golkar.

Kemudian Habib Aboe Bakar Alhabsyi menerangkan, selanjutnya dapat ditempuh ketentuan Pasal 87 Ayat 2 huruf

d UU MD3, dimana pemberhentian dapat diusulkan partai politik yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Adapun untuk pemberhentian secara tetap, kami mengikuti ketentuan pasal 87 Ayat 2 Huruf c UU MD3. Pada ketentuan tersebut diatur pemberhentian tetap pimpinan DPR dilakukan jika yang bersangkutan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5," kata dia.

”

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

“Kami memang mendengar di media ada kabar bahwa saudara Azis Syamsuddin menyatakan mengundurkan diri ke partainya. Namun sampai saat ini MKD belum menerima berkas tersebut. Sehingga kita belum bisa mengambil langkah hukum,”



Fraksi PKS Soroti Meningkatnya Rencana Defisit APBN Tahun 2022

KUTIPAN

Jakarta (28/09) — Fraksi PKS DPR RI meminta Pemerintah untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam pengelolaan utang

Rencana Defisit APBN tahun 2022 sebesar Rp 868,02 triliun yang menimbulkan dampak pembiayaan utang sebesar Rp 973,58 harus dikelola secara produktif dan dengan tata kelola yang baik.

"Target penambahan utang pada 2022 niscaya akan menambah akumulasi utang Pemerintah saat ini, yang dinilai sudah sangat besar. Sebagai catatan, akhir Agustus 2021 posisi utang telah mencapai Rp 6.570,17 triliun atau 40,51 persen dari PDB," kata juru bicara FPKS Rofik Hananto saat membacakan Pendapat Mini FPKS dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2022, dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (28/09).

Rofik menambahkan, terus meningkatnya jumlah utang ini, mencerdai penerapan Fiscal

Sustainability Analysis (FSA) termasuk Debt Sustainability Analysis (DSA) dalam pengelolaan utang Pemerintah. Untuk mengingatkan kembali, dalam laporan hasil reviu BPK terkait kesinambungan fiskal APBN 2020, menyebutkan bahwa indikator kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR).

"Yaitu Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%; Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6%-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7%-10%; dan Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92%-

150%. Indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan ISSAI 5411 yaitu di bawah 0%," kata Aleg asal Dapil Jawa Tengah VII itu.

Fraksi PKS, lanjut Rofik, mengingatkan Pemerintah bahwa terus bertambahnya beban utang akan mempersempit keleluasaan fiskal yang pada akhirnya akan mengurangi alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, beban bunga utang setiap tahunnya terus bertambah.

Pada 2014 rasio beban bunga utang sebesar 11,6 persen dari penerimaan perpajakan atau 8,6 persen dari pendapatan negara, kemudian pada 2021 rasio beban bunga utang diproyeksi 25,2 persen dari pendapatan perpajakan atau 21 persen dari total pendapatan negara, yaitu sebesar Rp 373,3 triliun. Dalam realisasinya, pada 2019 dan 2020 masing-masing mengalami kenaikan beban bunga utang sebesar 10 persen dan 14 persen.

"Fraksi PKS juga menyoroti dampak lanjutan atas kurang produktifnya pengelolaan utang Pemerintah, berupa tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2020, yang harusnya menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan APBN 2022. Sehingga pemanfaatan utang



H. ROFIK HANANTO, S.E.
Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Fraksi PKS, lanjut Rofik, mengingatkan Pemerintah bahwa terus bertambahnya beban utang akan mempersempit keleluasaan fiskal yang pada akhirnya akan mengurangi alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, beban bunga utang setiap tahunnya terus bertambah."

yang tidak optimal dan produktif dapat memicu persoalan turunan berupa timbulnya beban utang atas SiLPA atau dengan kata lain adanya beban utang atas likuiditas yang idle," katanya.

Rofik menambahkan, Fraksi PKS berpendapat target defisit anggaran tahun 2022

sebesar 4,85 persen dari PDB harus menjadi konsen utama Pemerintah agar mampu menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, terutama mengingat pada 2023 defisit kembali maksimal 3 persen dari PDB.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

BURT Dorong Profesionalisme Layanan Bandara Meski Terdampak Pandemi

KUTIPAN

Jakarta (26/09) — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hamid Noor Yasin terus mendorong para pekerja layanan bandara terutama Joumpa Airport VIP Service untuk tetap konsisten terhadap profesionalisme mereka dalam memberikan jasa layanan bandara, baik kepada Anggota Dewan maupun pengguna jasa layanan bandara.

Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlemenaria usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau pelayanan kebandaraan Joumpa bersama jajaran direksi Angkasa Pura dan Gapura Angkasa di New Yogyakarta International Airport (NYIA), Kulon Progo, Yogyakarta, Jumat (24/9/2021). Menurut Hamid, Gapura Angkasa membutuhkan kreativitas lebih dalam mengarungi masa pandemi.

“Fenomena ini sangat luar biasa, sehingga otomatis dari pihak Angkasa Pura, juga dari Gapura Angkasa harus berpikir secara extra effort. Artinya (perlu langkah) yang sangat luar biasa untuk mengatasi kondisi yang memang betul-betul memukul sektor penerbangan ini. Kita harus bersyukur sektor ini masih bisa eksis,” ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan,

telah ada ribuan PHK yang dilakukan dalam industri penerbangan dan kebandaraan, sehingga hal ini sangat memukul industri tersebut. Dengan kreativitas tinggi untuk bertahan di tengah pandemi, ia berharap ketika ada perubahan status dari pandemi menjadi endemi, atau kembali ke situasi normal, industri ini akan kembali membutuhkan banyak pegawai.

“Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan segera kembali normal. Karena prediksinya nanti akan dibutuhkan ratusan ribu tenaga setelah kondisi kembali normal. Sehingga ini pun juga berdampak bagi teman-teman yang melakukan perjalanan penerbangan,” jelas Anggota Komisi V DPR RI tersebut.

Sebagai Anggota BURT, Hamid mengaku mendapatkan mandat agar bisa melakukan pengawasan terhadap aktivitas penerbangan Anggota Dewan. Ia berharap BURT dan PT Angkasa Pura, PT Garuda Angkasa, dan Joumpa Airport VIP Service terus menjalin hubungan intens guna membantu tugas konstitusional kedewanan.

“Kami tentu ingin membangun jalinan yang intens agar bisa mempersiapkan diri dalam rangka melakukan penyambutan dan pelayanan kepada Anggota Dewan yang jumlahnya ada 575. Kami hanya ingin berpesan, dengan bandara yang bagus ini, penyambutan juga harus baik, pelayanan juga harus baik dan



Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota BURT DPR RI

“Kami tentu ingin membangun jalinan yang intens agar bisa mempersiapkan diri dalam rangka melakukan penyambutan dan pelayanan kepada Anggota Dewan yang jumlahnya ada 575. Kami hanya ingin berpesan, dengan bandara yang bagus ini, penyambutan juga harus baik, pelayanan juga harus baik dan professional, sehingga menciptakan kenyamanan terhadap teman-teman anggota yang mendapat tugas ke daerah”

professional, sehingga menciptakan kenyamanan terhadap teman-teman anggota yang mendapat tugas ke daerah,” imbuhnya.

Senada dengan Hamid, Anggota BURT DPR RI Indah

Kurnia menyampaikan bahwa dalam kondisi extraordinary seperti saat ini, industri diharapkan tidak menerapkan skema business as usual.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

مسابقة قراءة الكتاب فتح المعين



Diselenggarakan Dalam Rangka
Milad Fraksi PKS DPR RI Ke-17 dan
Hari Santri Nasional 2021



LOMBA BACA KITAB KUNING[®] TINGKAT NASIONAL 2021

KITAB YANG DIBACA

Kitab yang dibaca adalah Kitab
Fathul Mu'in Karya Syaikh
Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbarby

SYARAT PESERTA

- 1 Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2 Putra/Putri
- 3 Usia 17 - 25 tahun
- 4 Pendidikan minimal Madrasah Aliyahatau yang sederajat
- 5 Belum pernah menjadi juara 1 - 3 Lomba Kitab Kuning FPKS tingkat Nasional (2016-2020)

Raih Juaraanya Rebut Hadiyahnya

Juara 1	UMRAH (Rp 30.000.000)	Juara Harapan 1	Rp 15.000.000,-
Juara 2	Rp 25.000.000,-	Juara Harapan 2	Rp 10.000.000,-
Juara 3	Rp 20.000.000,-	Juara Harapan 3	Rp 5.000.000,-

Setiap Peserta akan mendapat sertifikat yang ditanda tangani oleh
Ketua Majelis Syura, Presiden PKS dan Ketua Fraksi PKS DPR RI



HADIAH UTAMA
UMRAH

PENDAFTARAN

Link Pendaftaran online:
<https://bit.ly/lbkkvrtual2021fraksipks>

AGENDA PELAKSANAAN

Masa Pendaftaran

20 Oktober - 13 November 2021

Babak Penyisihan di 34 Provinsi akan diselenggarakan antara 14 November hingga 2 Desember 2021 bertempat di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di 34 Provinsi se Indonesia.

Babak Final: Rabu 8 Desember 2021

NARAHUBUNG

0856-4554-6397 Agus. A. Wahid MG, SPd, M.Sc.
0822-6062-1141 Susiati Puspasari, B.Sc., M.Sc.
0813-2025-0848 Iman Sulaiman, Lc.
0813-8642-7673 Dr. Suesilowati

DEWAN JURI

KH. Syuhada[®] Syarkun, S.Ag., M.HI.
(Pesantren Tebuireng-Jombang Jatim)
KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA
(Ketua Umum MAPADI)
Dr. KH. Ali Akhmadi, MA, Al-Hafidz
(Ketua BPU-DPP PKS)



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Habib **Dr. Salim** Segaf Aljufri, MA
Ketua Majelis Syuro PKS



Image: Istimedia

Penurunan AKI dan AKB, Prioritas yang Bukan Prioritas: Tinjauan APBN 2021-2022

OLEH

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi PKS

Ada hal yang menarik dari pidato Presiden saat menyampaikan Nota Keuangan APBN 2022 di depan Parlemen. Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah menyiapkan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 dimana yang pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Untuk itu Pemerintah mengalokasikan Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara.

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain adalah antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan

AKI dan AKB dalam Kebijakan Kesehatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memberikan arah pembangunan bidang

kesehatan dengan visi meningkatkan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional, khususnya penguatan pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kebijakan dalam RPJMN ini difokuskan pada lima hal yaitu Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan.

Peningkatan kesehatan ibu dan anak difokuskan pada upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI), angka kematian bayi lahir (AKB), angka kematian neonatal dan peningkatan cakupan

Penurunan AKI dan AKB, Prioritas yang Bukan ... (2)

vakasinas.

Dalam 30 tahun terakhir, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah mampu menurunkan AKI dimana pada tahun 2020 AKI di Indonesia sudah mencapai 230 per 100 ribu melahirkan. Namun jika dilihat tren penurunannya, masih sangat lambat.

Bahkan AKI saat ini juga masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) yaitu sebesar 102 per 100 ribu peristiwa melahirkan.

Dengan penurunan AKI

yang hanya 1,8% per tahun , Indonesia juga diperkirakan tidak akan mampu mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) sebesar 70 kematian ibu per 100 ribu penduduk.

Hal yang sama juga terjadi pada penurunan AKB yang masih berlangsung lambat. Meskipun AKB pada tahun 2020 telah mencapai 21 kematian per 100 ribu kelahiran, namun dengan tren penurunan yang masih lambat dipikirkan juga tidak akan mencapai target SDGs pada

2030 sebesar 12 kematian bayi per 100 ribu kelahiran.

Upaya pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB masih jauh dari harapan. Padahal kebutuhan untuk menurunkan AKI dan AKB ini sudah sangat mendesak mengingat Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan kematian setelah persalinan (neonatal) tertinggi di dunia. Upaya penurunan AKI dan AKB menjadi semakin berat akibat pandemi covid-19 yang berkepanjangan yang melanda Indonesia.

Setidaknya ada tiga penyebab potensi peningkatan AKI dan AKB akibat pandemi covid-19. Pertama adalah terjadinya penurunan layanan imunisasi dasar bagi balita dan pemeriksaan kecukupan gizi dan balita.

Hal ini disebabkan oleh menurunnya penyelenggaraan posyandu dimana hampir 50% Puskesmas tidak mengadakan Posyandu selama masa pandemi dan cukup banyak Puskesmas yang menutup layanan/operasional karena tenaga kesehatannya (Nakes) yang terpapar covid-19.

Kedua, terjadinya penurunan pelayanan pemeriksaan kehamilan rutin bagi ibu hamil akibat pandemi. Penurunan terjadi karena



Dengan penurunan AKI yang hanya 1,8% per tahun , Indonesia juga **diperkirakan tidak akan mampu** mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) sebesar 70 kematian ibu per 100 ribu penduduk. (Image: Istimewa)

layanan Puskesmas ataupun RSUD yang tutup sementara akibat adanya Nakes yang terpapar covid mau kekhawatiran ibu hamil untuk datang memeriksakan kehamilan ke Faskes untuk tertular virus covid-19 ini.

Data Kemenkes misalnya menyebutkan 84% Pelayanan

Kesehatan Terdampak dalam 6 bulan awal pandemi. Di sisi lain 83,6% Puskesmas mengalami penurunan kunjungan pasien. Ketiga, potensi peningkatan AKB ini disebabkan adanya potensi peningkatan stunting akibat pandemi covid-19 ini yang diperkirakan meningkat hingga 7 juta anak.

KUTIPAN

Peningkatan kesehatan ibu dan anak difokuskan pada upaya penurunan angkat kematian ibu melahirkan (AKI), angka kematian bayi lahir (AKB), angka kematian neonatal dan peningkatan cakupan vaksinasi. Dalam 30 tahun terakhir, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah mampu menurunkan AKI dimana pada tahun 2020 AKI di Indonesia sudah mencapai 230 per 100 ribu melahirkan. Namun jika dilihat tren penurunannya, masih sangat lambat.

Penurunan AKI dan AKB, Prioritas yang Bukan ... (3)



Masih banyak masyarakat di pedesaan yang lebih percaya kepada penolong kelahiran tradisional seperti dukun beranak, paraji, kepercayaan untuk melahirkan di rumah atau bahkan di hutan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan. Di sisi lain banyak masyarakat yang juga karena keadaan maupun tradisi juga melakukan nikah pada usia yang belia dan kemudian juga melahirkan dalam usia muda yang berisiko.

Tantangan untuk menekan atau menurunkan angka AKI dan AKB di Indonesia dengan wilayah yang tersebar begitu luas dengan ribuan pulau yang dihuni dan dataran yang bervariasi sangatlah berat. Dari mulai akses ke faskes yang sulit pada penduduk di daerah pegunungan maupun pulau-pulau kecil, infrastruktur yang

masih minim di pedalaman, tenaga bidan dan dokter yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan di semua wilayah dan jumlah penduduk yang besar sampai dengan tradisi yang masih menghambat.

Masih banyak masyarakat di pedesaan yang lebih percaya kepada penolong kelahiran tradisional seperti dukun

beranak, paraji, kepercayaan untuk melahirkan di rumah atau bahkan di hutan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan.

Di sisi lain banyak masyarakat yang juga karena keadaan maupun tradisi juga melakukan nikah pada usia yang belia dan kemudian juga melahirkan dalam usia muda yang berisiko.

Antara Tantangan dan Kebijakan Anggaran Penurunan AKI dan AKB

Tantangan penurunan AKI dan AKB yang demikian besar seharusnya didukung dengan alokasi anggaran yang juga besar.

Namun kenyataannya dalam alokasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di 2021, alokasi anggaran untuk peningkatan Kesehatan Ibu dan anak sekaligus penurunan angka AKI dan AKB hanya 0,8 triliun atau hanya 1% dari total anggaran prioritas nasional bidang kesehatan dan hanya 0,9% dari total anggaran Reguler Kemenkes.

Angka ini juga berarti hanya 0,4% dari total anggaran Kemenkes tahun 2021 (termasuk anggaran penanganan covid-19). Padahal penurunan AKI dan AKB ini

sudah menjadi konsensus global menjadi salah satu target dalam MDGs maupun SDGs.

Komponen APBN yang terkait dengan AKI dan AKB yang disalurkan melalui sektor kesehatan, ada juga yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Belanja TKDD yang digunakan untuk mendukung target penurunan AKI dan AKB ialah sebagian besar dialokasikan melalui Dana Transfer Khusus (DTK), yang terdiri atas DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB baik reguler maupun penugasan serta DAK Nonfisik melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan

Operasional Keluarga Berencana (Dana BOK dan BOKB).

Proporsi DAK Fisik terhadap anggaran kesehatan dalam TKDD mencapai lebih dari 50% atau yang terbesar dibanding komponen lain.

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR menunjukkan bahwa pemberian alokasi anggaran DAK Fisik penugasan berupa pembangunan gedung Puskesmas, pembangunan atau rehabilitasi RS rujukan maupun penggantian intervensi stunting, tidak disertai dengan penurunan nilai AKI pada provinsi-provisi yang menerima.

KUTIPAN

Upaya pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB masih jauh dari harapan. Padahal kebutuhan untuk menurunkan AKI dan AKB ini sudah sangat mendesak mengingat Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan kematian setelah persalinan (neonatal) tertinggi di dunia. Upaya penurunan AKI dan AKB menjadi semakin berat akibat pandemi covid-19 yang berkepanjangan yang melanda Indonesia.

Penurunan AKI dan AKB, Prioritas yang Bukan ... (Tamat)

Dari 16 provinsi penerima DAK Fisik penugasan, hanya 4 provinsi (25%) yang mengalami penurunan nilai AKI.

Sebaliknya 4 provinsi lain justru mengalami kenaikan AKI. Artinya, penambahan anggaran yang dialokasikan untuk penurunan AKI justru menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Hasil kajian tersebut juga menunjukkan tidak ada korelasi positif antara nilai AKI dan AKB dengan besaran alokasi anggaran DAK Fisik kesehatan untuk penurunan AKI dan AKB.

Sebaliknya juga dari

kebijakan anggaran DAK Fisik kesehatan itu terlihat ada daerah dengan AKI dan AKB rendah yang mendapat prioritas anggaran DAK Fisik Kesehatan untuk penurunan AKI dan AKB.

Demikian pula daerah yang memiliki AKI dan AKB tinggi namun tidak memperoleh prioritas anggaran DAK Fisik Kesehatan. Pola prioritas alokasi anggaran ini juga tidak mengalami perubahan signifikan dari anggaran 2020 ke 2021 dimana ada 6 provinsi dengan AKI tinggi dan 12 provinsi dengan AKB tinggi yang

tidak mengalami prioritas anggaran DAK Fisik Kesehatan.

Kebijakan yang kurang tepat dari sisi alokasi anggaran untuk penurunan AKI sebetulnya juga sudah berlangsung dari beberapa tahun sebelumnya dan tidak kunjung ada perbaikan. Dalam APBN 2014 misalnya alokasi anggaran untuk pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang muaranya juga penurunan AKI dan AKB hanya 0,54% dari total anggaran bidang kesehatan.

Tren penurunan AKI dan AKB yang sangat lambat secara implisit juga menunjukkan adanya strategi yang salah dalam kebijakan anggaran untuk penurunan AKI dan AKB ini. Strategi yang salah ini bisa berasal dari kurang tepatnya arah kebijakan dan program yang dirancang untuk penurunan strategi ini, maupun kelemahan dalam implementasi kebijakan di lapangan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Namun yang jelas dari alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN menunjukkan belum sinkronnya antara penetapan penurunan AKI dan AKB sebagai prioritas program bidang kesehatan dan kebijakan anggaran yang dibuat

KUTIPAN

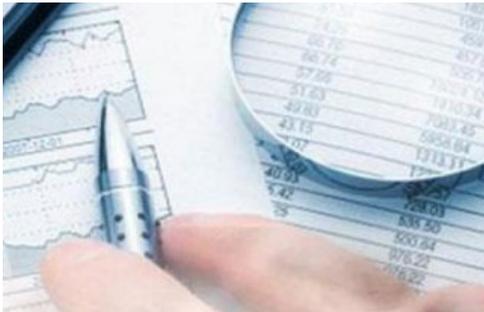
Tren penurunan AKI dan AKB yang sangat lambat secara implisit juga menunjukkan adanya strategi yang salah dalam kebijakan anggaran untuk penurunan AKI dan AKB ini. Strategi yang salah ini bisa berasal dari kurang tepatnya arah kebijakan dan program yang dirancang untuk penurunan strategi ini, maupun kelemahan dalam implementasi kebijakan di lapangan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

serta strategi implementasinya.

Pelajaran penting dari apa yang terjadi sebelumnya maupun implementasi lapangan dalam kebijakan anggaran penurunan AKI dan AKB dalam APBN 2020 dan 2021 tidak boleh lagi terjadi di APBN 2022. Jika pemerintah serius menjadikan penurunan AKI dan AKB sebagai prioritas bidang kesehatan, maka harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran penurunan AKI dan AKB ini.

Apalagi di 2022 diharapkan anggaran bidang kesehatan tidak lagi banyak tersedot untuk penanggulangan covid-19. Selain alokasi

anggaran penurunan AKI dan AKB yang perlu ditingkatkan, alokasi DTK melalui DAK baik fisik maupun non fisik bidang kesehatan yang ditujukan untuk penurunan AKI dan AKB harus betul-betul tepat sasaran wilayah dan tepat jenis program yang dilaksanakan. Pelaksanaan atas DTK dalam bentuk DAK bidang kesehatan oleh daerah ini juga harus dimonitor dan dievaluasi dengan baik sehingga alokasi anggaran yang diberikan efektif dalam penurunan AKI dan AKB. Jangan sampai AKI dan AKB hanya menjadi prioritas di kebijakan dan belum prioritas dalam anggaran. ●



Jika pemerintah serius menjadikan penurunan AKI dan AKB sebagai prioritas bidang kesehatan, maka **harus dilakukan evaluasi menyeluruh** terhadap kebijakan anggaran penurunan AKI dan AKB ini

Profil

- Nama Lengkap
K.H. Aus Hidayat Nur
- Tempat, Tanggal Lahir
Garut, 20 Juli 1961
- Dapil
Kalimantan Timur

Pendidikan

- **SMAN 8 Jakarta,**
1980
- **D3- LIPIA Jakarta,**
1983
- **SI Univ. Indonesia,**
Sastra Arab

Riwayat Organisasi

- **HMI cabang Jakarta,** 1980 – 1985
- **Pendiri Partai Keadilan,** 1998
- **Ketua DPP PKS Wilda Banjar dan Kalimantan,** 2002 – 2005
- **Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah,** 2005 – 2010
- **Ketua DPP PKS Badan Penegak Disiplin Organisasi -BPDO,** 2010 – 2012
- **Anggota MPP PKS,** 2013 – 2016
- **Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS,** 2016 – 2018
- **Ketua DPP Wilda Sulawesi,** 2018 – 2020

Keluarga

- Istri : **Susanti**
- Anak : **2 Laki-Laki**
4 Perempuan

Riwayat Pekerjaan

- **Guru SMP Islam Bahagia,**
Jakarta, 1986 – 1990
- **Guru SMA Islam At Taqwa,**
Jakarta, 1990 – 1992
- **Dosen STAI Al Qudwah,**
Depok, 1995 – 2000
- **Anggota DPR RI Dapil Kaltim,**
2009 – 2014
- **Badan Legislasi,** 2011 – 2014
- **Guru SMP Terbuka NF,**
Depok 2016 – 2018
- **Anggota DPR RI Dapil Kaltim,**
2018 – 2019
- **Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI,** 2018 – 2019

Media Sosial

- **KH. Aus Hidayat Nur**
- **@aus_kang**
- **@bubuhankangaus**



Jazuli Juwaini Gelar Vaksinasi dan Sosialisasi Germas Bersama Kemenkes di Kampus UPI Serang

KUTIPAN

Serang (28/09) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyelenggarakan kegiatan vaksinasi massal dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) yang didukung Kementerian Kesehatan RI di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Serang, Selasa 28 September 2021.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, Perwakilan Kementerian Kesehatan Irawati, Direktur UPI Serang Herli Salim, Kepala Dinas Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ahmad Hasanuddin, dan Danramil Kota Serang Kapten Infantri Jackson Baye.

Direktur UPI Serang Herli Salim mengucapkan terima kasih atas prakarsa dan advokasi Dr. Jazuli Juwaini yang telah memenuhi aspirasi UPI untuk pengadaan vaksinasi massal bagi keluarga besar UPI dan masyarakat. Kegiatan ini, menurutnya, bagian dari upaya

menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian vaksinasi khususnya di kalangan civitas akademika UPI.

Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengatakan bahwa semua pihak harus bekerjasama dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mengatasi dampak pandemi. Maka, ketika ada aspirasi dari UPI Serang untuk penyelenggaraan vaksin langsung kita kolaborasi dengan berbagai pihak khususnya Kementerian Kesehatan yang memiliki otoritas pengadaan vaksinasi.

"Hari ini kami Fraksi PKS

bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Serang, Kampus UPI Serang serta dibantu aparat TNI dan Polri menyelenggarakan program vaksinasi dan Sosialisasi Germas sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mempercepat proses vaksinasi agar covid segera dapat dikendalikan," ungkap Jazuli.

Jazuli mengatakan dalam kondisi pandemi covid saat ini seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk mengatasi wabah dan dampaknya secara sosial ekonomi. Untuk itu, selaku wakil rakyat dirinya akan terus mengadvokasi percepatan vaksinasi dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

"Terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya vaksinasi masal 1000 dosis di Kampus UPI Serang. Insya Allah ikhtiar ini dapat mempercepat terkendalinya wabah covid 19," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Semua pihak harus bekerjasama dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mengatasi dampak pandemi. Maka, ketika ada aspirasi dari UPI Serang untuk penyelenggaraan vaksin langsung kita kolaborasi dengan berbagai pihak khususnya Kementerian Kesehatan yang memiliki otoritas pengadaan vaksinasi."

Dapil Banten ini berpesan agar masyarakat taat melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan sehat, rajin berolah raga, dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT karena Allah Maha Berkehendak dan menghilangkan dan

mengangkat wabah covid dari bangsa kita.

"Salah satu bentuk ikhtiar sebagai hamba yang beriman, setelah berdoa kepada Allah, adalah melakukan vaksinasi. Masyarakat yang belum vaksin, ayo vaksin dimanapun berada," seru Jazuli.

Kunjungan di Dapil

Mufida Resmikan Program Padat Karya Infrastruktur di Jakarta Selatan

KUTIPAN

Jakarta (28/09) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati melakukan peletakan batu pertama pelaksanaan program Padat Karya Infrastruktur di Pancoran, Jakarta Selatan.

Program hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Mufida berharap program padat karya ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Padat Karya Infrastruktur ini semoga langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaannya ada gotong royong di masyarakat. Nilai gotong royong ini yang harus dipelihara agar tidak semakin terkikis," ujar Mufida.

Ia menuturkan, pelaksanaan program ini merupakan bagian dari program padat karya yang akan dilaksanakan di beberapa

wilayah DKI Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri juga oleh Lurah Pancoran Barat ini, Mufida menyampaikan pesan dan harapan semoga program padat karya yang dilaksanakan akan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar.

Setelah dilakukan peletakan batu pertama, Mufida juga berkeliling melihat dan mendapatkan penjelasan dari Ketua Yayasan Forum Birokrasi Masyarakat, Ahmad Sahal, perihal rencana pelaksanaan program ini secara keseluruhan.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Padat Karya Infrastruktur ini semoga langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaannya ada gotong royong di masyarakat. Nilai gotong royong ini yang harus dipelihara agar tidak semakin terkikis,"

Vaksinasi Gratis di Kota Cirebon, **Netty: Lawan Pandemi dengan Kolaborasi Total**

KUTIPAN

Cirebon (03/10) — Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, meminta setiap elemen bangsa agar berkola-borasi total dalam melawan pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 telah merusak tatanan sistem kesehatan, ekonomi dan sosial budaya Indonesia. Kita baru menyadari bahwa infra struktur dan supra struktur kesehatan tidak siap menghadapi gelombang pandemi. Fundamental ekonomi kita pun tercabik-cabik. Kolaborasi total semua elemen bangsa menjadi strategi utama dalam melawan pandemi," ujarnya dalam sambutan pembukaan program kemitraan Komisi IX DPR RI dan Kemenkes RI berupa Vaksinasi 1000 dosis bagi pelajar serta masyarakat umum kota Cirebon, Sabtu, (02/10/2021).

Kegiatan yang melibatkan kader dan konstituen DPD PKS Kota Cirebon sebagai pelaksana ini dilakukan di tiga titik yaitu, Sekolah Tinggi Farmasi Cirebon, SMPIT Sabilul Huda dan di Kelurahan Kasepuhan.

Dalam kegiatan yang dilakukan beriringan dengan sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) ini, Netty meminta pemerintah agar terus membenahi kolaborasi total dengan semua pihak sebagai bentuk komitmen bersama dalam menurunkan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Saat ini bukan lagi masanya mengandalkan pihak-pihak tertentu, apalagi membatasi kerjasama hanya pada kelompok yang dianggap berkoalisi dengan pemerintah. Pandemi hanya dapat diatasi jika setiap elemen bangsa berkontribusi dalam penanganan pandemi," tandas Netty.

Program vaksinasi di Kota Cirebon juga mendapat dukungan dari Dinkes Kota Cirebon yang menurunkan tim vaksinator dari beberapa puskesmas terdekat.

"Pemerintah mengapresiasi dukungan

anggota Komisi IX DPR RI dan pihak lain yang terlibat dalam percepatan program vaksinasi ini. Kami menyadari masih dijumpai banyak kendala di lapangan, termasuk adanya ketidaksesuaian data antara jumlah dosis yang keluar dengan data jumlah masyarakat yang telah divaksinasi," kata Sadikin Sadek, Direktur Penilaian Alkes dan PKRT, Kemenkes RI yang hadir dalam acara pembukaan vaksinasi di STF Cirebon.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah memperbaiki sistem input data dalam program vaksinasi.

"Vaksinasi adalah upaya membangun kekebalan kolektif sebagai game changer pandemi. Jangan sampai persoalan teknis semisal input data menjadi kendala," katanya.

Anggota DPRD Kota Cirebon dari PKS, Karso, meminta kader-kadernya agar menjadi contoh dalam penerapan protokol kesehatan serta membantu sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi.

"Tunjukkan bahwa PKS siap berkolaborasi melayani rakyat bersama elemen bangsa lain," katanya.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Saat ini bukan lagi masanya mengandalkan pihak-pihak tertentu, apalagi membatasi kerjasama hanya pada kelompok yang dianggap berkoalisi dengan pemerintah. Pandemi hanya dapat diatasi jika setiap elemen bangsa berkontribusi dalam penanganan pandemi"



Kunjungi Dapil di Landak, **Bang Alif Bantu** **Anak Penderita** **Penyakit Jantung**

KUTIPAN

Landak (05/10) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, memberikan bantuan biaya operasional untuk pengobatan kepada Agli Zaki Saputra (3 tahun).

Balita asal Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, ini tengah dalam persiapan berangkat menuju ke Jakarta dalam upaya pengobatan di Rumah Sakit (RS) Jantung Harapan Kita, diketahui Zaki mengidap penyakit jantung.

"Alhamdulillah biaya pengobatan di tanggung BPJS, tapi tetap harus juga dikawal agar tetap berjalan sesuai prosedur semestinya, namun kami juga mengirimkan sedikit bantuan untuk biaya pengobatan jantung bocor ananda Zaki," ucap Alifudin dalam keterangannya, Senin, (04/10/2021).

Alifudin menambahkan bahwa, ananda Zaki di diagnosa mengidap kebocoran jantung oleh RSUD Dr. Soedarso Pontianak dan dirujuk ke RS Jantung Harapan Kita Jakarta.

"Insyallah bermanfaat untuk biaya operasional selama di Jakarta" tambah Bang Alif sapaan akrabnya

Ketua DPD PKS Kabupaten Landak Ya'Asurandi menyampaikan akan mengawal proses pengobatan ke Jakarta, hal tersebut disampaikan saat mendampingi Alifudin dalam prosesi pemberian bantuan.

"Kami juga akan berikhtiar dengan cara berkomunikasi kepada Bupati Landak, agar Dinas terkait bisa lebih memperhatikan masyarakat yang perlu bantuan karena kekurangan biaya Pengobatan" tegas Ya'Asurandi.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

"Alhamdulillah biaya pengobatan di tanggung BPJS, tapi tetap harus juga dikawal agar tetap berjalan sesuai prosedur semestinya, namun kami juga mengirimkan sedikit bantuan untuk biaya pengobatan jantung bocor ananda Zaki,"

Gelar Rembug Petani Nasional, PPNSI Refleksikan Hari Tani Nasional

KUTIPAN

Sukabumi (25/09) — Refleksi Hari Tani Nasional (HTN) 2021, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (DPP PPNSI) menggelar acara bertajuk Rembug Petani Nasional.

menggelar acara bertajuk Rembug Petani Nasional mengambil tempat di kawasan Agro Wisata Mina Padi Sawah Lega, Cikurutug, Cireunghas, kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Jum'at (24/9/2021).

Ketua Umum PPNSI, Slamet menyatakan dalam merefleksikan HTN tahun ini pihaknya melakukan dialog terbuka kepada seluruh petani di Indonesia melalui offline dan juga online guna menyerap berbagai potensi, masukan, permasalahan dan kendala-kendala petani di lapangan.

"Alhamdulillah kegiatan diskusi ini boleh dibilang cukup interaktif dan sukses bahkan kita juga menangkap masukan dan potensi petani milenial. Menanggapi berbagai keluhan

para petani tentunya kita sebagai organisasi massa yang hanya bisa mendampingi, coba kita rangkai seluruh potensi karena kami yang ada di dalamnya sebagai pelaku sehingga semangat kebersamaan nantinya akan saling sinergis menguatkan, dan memanfaatkan jaringan. Saya yakin ketika niat kita baik di dalam organisasi ini, pasti Insya Allah semua bisa menjawab minimal menjawab kebutuhan anggota itu untuk baik marketingnya pengetahuannya upgrade teknologi dan lain-lain," terang Slamet kepada awak media.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

"Menanggapi berbagai keluhan para petani tentunya kita sebagai organisasi massa yang hanya bisa mendampingi, coba kita rangkai seluruh potensi karena kami yang ada di dalamnya sebagai pelaku sehingga semangat kebersamaan nantinya akan saling sinergis menguatkan, dan memanfaatkan jaringan. Saya yakin ketika niat kita baik di dalam organisasi ini, pasti Insya Allah semua bisa menjawab minimal menjawab kebutuhan anggota itu untuk baik marketingnya pengetahuannya upgrade teknologi dan lain-lain"



مسابقة قراءة الكتاب
LOMBA BACA
KITAB KUNING[®]
TINGKAT NASIONAL 2021



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



HARI SANTRI 2021
**SANTRI SIAGA
JIWA RAGA**

Selamat Hari

SANTRI
— Nasional

22 Oktober 2021

Saat Berada di Dapil, Nevi **Advokasi** Bantuan 116 Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat

KUTIPAN

Kabupaten Agam (29/09) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mengupayakan bantuan kepada masyarakat yang masih memiliki rumah tidak layak huni agar berubah menjadi memiliki rumah layak huni dengan lingkungan masyarakat yang sehat.

Nevi mengatakan, Sebanyak 116 rumah yang sedang di advokasi, tersebar di sekitar kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan kota Payakumbuh. Selain itu, masih rumah - rumah tidak layak huni di Sumbang Bantuun untuk di perbaiki.

"Saya meninjau beberapa rumah yang sedang proses pembangunan dimana sebelumnya tidak layak huni. Semoga setelah di pugar dan di bangun, akan menjadi rumah yang nyaman di huni, lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas dalam bersosial kemasyarakatan", tutur Nevi. Kunjungan legislator asal

Sumbang ini langsung ke lapangan untuk memastikan proses pembangunan RTLH ini selesai sesuai dengan jadwal waktu yang di tentukan.

"Karena sangat banyak yang mesti di selesaikan, dan untuk perodesasi berikutnya juga akan segera direalisasikan sesuai dengan data fakta lapangan lokasi-lokasi masyarakat yang menempati RTLH untuk diberikan bantuan agar rumahnya menjadi layak huni," pungkasnya.

Nevi berharap, selain yang ia upayakan, agar banyak pihak terutama institusi-institusi baik pemerintah maupun swasta untuk menyisihkan

anggarannya dalam bentuk CSR yang di berikan kepada masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.

"Tempat tinggal ini sebagai tempat istirahat merupakan tempat untuk mengembalikan kualitas hidup. Semakin sehat tempat tinggal yang digunakan, kualitas kesehatan penghuninya juga akan berkualitas.

Terutama untuk anak-anak yang merupakan generasi penerus mesti memiliki kesehatan baik fisik, ruhani maupun pemikiran. Mental anak-anak mesti kita kuatkan salah satunya menempatkan tempat yang layak untuk tidur atau istirahat, bersuci dan bercengkrama dengan keluarga", urai Nevi.

Politisi PKS ini dengan sambutan yang dilakukan warga, semakin semangat untuk terjun langsung ke lapangan, dan menyaksikan kebahagiaan yang tak tergambar karena akan segera menempati kediaman yang layak huni, dimana rumah mereka adalah surganya.

"Dengan mengupayakan masyarakat untuk menempati rumah yang layak, maka secara



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

Saya meninjau beberapa rumah yang sedang proses pembangunan dimana sebelumnya tidak layak huni. Semoga setelah di pugar dan di bangun, akan menjadi rumah yang nyaman di huni, lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas dalam bersosial kemasyarakatan

tidak langsung kita semua sedang mengupayakan Pansasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Semoga gerakan mengentaskan masyarakat

hingga memiliki Rumah layak huni dapat masif ke seluruh penjuru pelosok Indonesia dan secara khusus wilayah Sumatera Barat dapat bebas dari RTLH", tutup Nevi Zuairina.

Aleg PKS Upayakan Korban Kebakaran di Kampung Gentong Dapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

KUTIPAN

Anggota Komisi V DPR RI ini juga akan mengupayakan agar korban mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2022 nanti.

Tasikmalaya (24/09) — Anggota Legislatif Pusat dari Fraksi PKS asal Tasikmalaya Toriq Hidayat mengunjungi warga kampung gentong, Tasikmalaya, yang rumahnya ludes terbakar. Politisi PKS ini memberikan bantuan berupa dana tunai untuk perbaikan rumah korban. “Semoga bantuan dari PKS ini dapat meringankan Bapak Ateng dan keluarganya untuk membangun rumahnya kembali. Walau sementara ini kondisi darurat. Yang penting mereka punya tempat berteduh dulu,” tuturnya.

Anggota Komisi V DPR RI ini juga akan mengupayakan agar korban mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun

anggaran 2022 nanti.

“Kami akan mengajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) supaya rumah Bapak Ateng masuk program BSPS Tahun depan. Agar layak huni,” Kata Toriq.

Disaksikan oleh tokoh setempat, Ateng menerima langsung bantuan tunai dari PKS tersebut. Ia mengucapkan banyak terima kasih. Sebagai rasa syukur, dana tersebut akan segera digunakan untuk membangun rumahnya kembali.

Toriq menuturkan, saat kejadian, api dengan cepat membakar rumah sederhana yang dihuni oleh Ateng dan keluarganya karena metarial bangunan terbuat dari kayu.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut.

“Penyebab kebakaran belum diketahui. Untuk sementara pemilik rumah dievakuasi ke rumah saudaranya. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai Rp20-an juta,” sebutnya.

Toriq bersyukur karena warga Kampung Gentong, Kecamatan Kadipaten, Tasikmalaya bergotong royong. Membantu Ateng dan keluarga. Dari mulai memadamkan api, mengevakuasi dan bersiap bangun rumah korban kembali.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“Kami akan mengajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) supaya rumah Bapak Ateng masuk program BSPS Tahun depan. Agar layak huni,



Hadirkan Solusi atas Persoalan Bangsa, Anis Byarwati **Resmikan** Rumah Tangguh Berdaya

KUTIPAN

Jakarta (29/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati meresmikan Rumah Tangguh Berdaya (RTB) PKS Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Duren Sawit bersinergi dengan Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi (BPJE) Duren Sawit.

RTB yang digagas oleh (BPJE) Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Jakarta Timur ini, adalah wadah untuk mempertemukan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berdomisili di Jakarta Timur.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, Ketua DPC PKS Duren Sawit, Bambang Halilintar, Ketua DPD PKS Jakarta Timur, Ikrar Aulia, Ketua BPJE DPD Jakarta Timur, Tajuddin, perwakilan dari Kelurahan Pondok Bambu, ketua RT dan RW setempat beserta jajarannya.

Karena masih dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), peresmian RTB PKS Duren Sawit ini berlangsung secara hybrid, dilakukan offline dengan prokes ketat, dan secara virtual yang diakhiri dengan pelatihan Digital Marketing, dengan peserta 30 pelaku UMKM di Kecamatan Duren Sawit.

Dalam kegiatan ini, Anis yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, memberikan apresiasi dengan hadir secara langsung dan memberikan semangat kepada

para pengurus.

"RTB adalah salah satu kontribusi PKS untuk masyarakat, walaupun di Parlemen kita adalah oposisi, tetapi PKS selalu berusaha menjadi yang terdepan dalam membantu masyarakat. PKS tidak hanya bernarasi, tapi PKS bertindak langsung memberdayakan masyarakat melalui program RTB PKS," tegasnya.

"Melalui RTB, kita tunjukkan bahwa PKS menjadi bagian dari pilar solusi permasalahan bangsa, karena indikator penting kemajuan sebuah negara adalah dari banyaknya pelaku Wirausaha," tandas Anggota Komisi XI ini.

Diakhir kegiatan, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyapa para pelaku usaha UMKM dengan berbagai produk yang ditawarkan melalui Etalase Bazar UMKM yang digelar, dan menyampaikan pesan pentingnya.

"Kondisi global mengharuskan kita saling bersinergi dan saling peduli. Jika ingin usaha UMKM nya



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Kondisi global mengharuskan kita saling bersinergi dan saling peduli. Jika ingin usaha UMKM nya dibantu, dilatih, diberdayakan, maka bergabunglah bersama RTB PKS"

dibantu, dilatih, diberdayakan, maka bergabunglah bersama RTB PKS," pungkaskannya.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada

Ketua BPJE Duren Sawit dan penerbangan balon sebagai bentuk simbolisasi telah diresmikannya RTB Kecamatan Duren Sawit.

Kundupil di Depok, Nur Azizah **Temui** Masih Banyak Warga Keluhkan Masalah Bansos

KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid dalam acara kunjungan daerah pemilihan (Kundupil) di kediaman Ade Mahmud, Ketua RT 07, RW 14, Pondok Duta, Cimanggis, Depok, pada Jumat (10/9),

Nur Azizah menerima aspirasi warga yang hingga saat ini masih mengeluhkan masalah bansos yang tidak tepat sasaran.

Menurut Nur Azizah, ini bukan pertamakali ia mendapat keluhan serupa, sejak memasuki masa pandemi Covid-19, semakin banyak masyarakat di dapil yang terdampak secara ekonomi, ada yang di PHK dari perusahaan ada juga yang berprofesi sebagai pedagang harian yang sepi pembeli hingga harus gulung tikar.

Pada kesempatan ini, Henry Simbolon selaku Ketua RW 14, menyebutkan bahwa di Perumahan Pondok Duta, Depok khususnya, Bansos yang

disalurkan dari pemerintah banyak yang salah sasaran.

“Pertama masalah data yang tidak tepat sasaran, dulu pernah menerima data dari dinsos untuk di klarifikasi tapi tidak boleh di koreksi, hanya di klarifikasi alamatnya benar atau tidak, orangnya benar tidak. Tapi setelah dilihat nama yang ada di daftar itu, saat ini ada yang mobilnya sudah dua. Ngambil uang bansos ke kator RW naik Alphard, ngambil beras 10 kg dan uang 500 ribu, tidak malu”, ungkap Henry.

Hal serupa juga disampaikan Sugiarto, selaku Sekretaris RW 14. Menurutnya, setelah Maret 2020 di awal masa pandemi, semua orang boleh memasukan data untuk

dapat bansos. “Itu dibuka lebar secara online. Di Pondok Duta ini ada sekitar 67 orang. Dan banyak warga yang mendaftar online tanpa sepengetahuan kami RT dan RW, saya tidak bisa berbuat banyak karena sudah turun begitu saja. Beras maupun paket-paket sembako. Dan kami harus membagikan berdasarkan data yang secara mendadak diberikan”, imbuh Sugiarto.

Sugiarto menambahkan bansos juga turun dari Propinsi Jabar, pendataan melalui website Pemprov Jabar. “Di situ ada keterangan, tambahkan bila menurut anda diperlukan. Saya tambahkan data warga yang menurut kacamata saya membutuhkan. Saya menambahkan 30 orang. Lalu keluar data lagi, dan ada keterangan ‘dikoreksi bila menurut anda tidak layak’, lalu ada yang saya coret yang menurut saya mampu. Tapi pas coret itu tetap muncul”, jelas Sugiarto.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“ ini bukan pertamakali ia mendapat keluhan serupa, sejak memasuki masa pandemi Covid-19, semakin banyak masyarakat di dapil yang terdampak secara ekonomi, ada yang di PHK dari perusahaan ada juga yang berprofesi sebagai pedagang harian yang sepi pembeli hingga harus gulung tikar. “

Saat di Dapil, Hermanto Fasilitasi Bimtek untuk Peternak Sumatera Barat

KUTIPAN

Kabupaten Solok (27/09) -- Setelah memfasilitasi petani tanaman pangan dan hortikultura dengan bimtek, Ahad (26/9/2021),

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto memfasilitasi peternak dengan Bimbingan Teknis (bimtek) Manajemen Peternakan dan Kesehatan Hewan Komoditas Ayam di Auditorium BPTP Sumatera Barat, Sukarame, Kabupaten Solok.

Sehari sebelumnya, Sabtu (25/9), kegiatan serupa juga untuk komoditas sapi potong digelar di Auditorium BPTU Padang Mengatas, Kabupaten Lima Puluh Kota.

"Dalam bimtek ini para narasumber diharapkan tidak hanya memberikan ilmu terkait budidaya ayam yang baik, tetapi berikan juga wawasan terkait pemasarannya," ujar Hermanto dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

Sekarang ini, lanjutnya, para peternak mengeluh karena harga daging ayam sedang turun.

"Sebenarnya, bisnis komoditas ayam itu bervariasi. Jenis ayam juga bermacam-macam. Ada ayam ras dan bukan ras (buras). Yang sedang turun saat ini harga daging ayam ras karena perusahaan penyedia bibit masuk juga ke bisnis pembesaran," papar legislator dari FPKS DPR RI ini.

Karena itu, kata Hermanto, sangat penting memberikan wawasan pasar kepada peternak.

"Ajari peternak mencermati pasar guna mengurangi resiko kerugian akibat harga rendah," ujar Hermanto.

"Sampaikan jenis ayam apa saja yang pasarnya belum jenuh. Atas dasar itulah diharapkan para peternak memilih jenis ayam yang akan dibudidayakannya," ucap Hermanto.

Kepada para peternak,

Hermanto meminta agar mengikuti kegiatan bimtek ini dengan seksama.

"Kegiatan ini dibiayai oleh negara untuk meningkatkan kapasitas para peternak. Harapannya, ilmu yang didapat dari kegiatan ini bisa diterapkan sehingga pengelolaan ternak kedepan jauh lebih baik," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Kegiatan bimtek untuk peternak terselenggara atas kerjasama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Komisi IV DPR RI.

Dalam kegiatan bimtek ini hadir sebagai narasumber Kepala BPTU (Balai Pembibitan Ternak Unggul) Dani Kusworo dan Kepala BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Rustam. Kegiatan yang berlangsung 2 hari tersebut diikuti oleh total 114 peserta.

Para peserta berasal dari 12 daerah di Sumatera Barat meliputi: Solok, Kota Solok, Solok Selatan, Padang, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Padang Panjang, Tanah Datar, Sijunjung, Dharmasraya, Sawahlunto dan Kepulauan Mentawai.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Dalam bimtek ini para narasumber diharapkan tidak hanya memberikan ilmu terkait budidaya ayam yang baik, tetapi berikan juga wawasan terkait pemasarannya,

Sekarang ini, para peternak mengeluh karena harga daging ayam sedang turun. Sebenarnya, bisnis komoditas ayam itu bervariasi. Jenis ayam juga bermacam-macam. Ada ayam ras dan bukan ras (buras). Yang sedang turun saat ini harga daging ayam ras karena perusahaan penyedia bibit masuk juga ke bisnis pembesaran"

Saat di Dapil, Andi Akmal Laksanakan Bimtek Pengembangan Komoditi Tanaman Semusim dan Rempah

KUTIPAN

Kabupaten Bone (27/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin secara rutin melakukan bimbingan Teknis kepada para kelompok Tani dengan berbagai serial tema untuk peningkatan wawasan baik informasi teknologi, regulasi hingga persoalan teknis yang berkembang.

Pada kali ini, Akmal melakukan Bimtek dengan tema Pengembangan Komoditi Tanaman semusim dan Rempah yang dikerjasamakan dengan program kementerian pertanian yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Program tanaman semusim ini merupakan program Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian

"Saat ini, pengembangan pangan musti mulai melebar tidak hanya pada produksi beras. Meskipun Beras menjadi

fokus utama dengan perkiraan konsumsi masyarakat sebesar 29,58 juta ton, program diversifikasi mesti tetap berjalan dengan alternatif pangan yang secara perlahan dapat dipersiapkan", tutur Akmal.

Akmal menjelaskan, bahwa Tanaman semusim atau tanaman tahunan merupakan istilah agrobotani untuk tumbuhan yang dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanam. Ia mencontohkan beberapa tanaman semusim antara lain Tebu Cokelat

engkeng dan rempah seperti jahe, kunyit, dll.

Untuk tanaman pangan, Akmal mencontohkan salah satunya untuk kawasan beriklim tropika adalah jagung.

Anggota DPR RI Komisi IV ini menguraikan, saat ini sedang berlangsung Panera raya jagung di sejumlah sentra di luar pulau Jawa. Sinergi pemerintah dan petani mesti kuat untuk tataniaga jagung yang memasok sentra ternak di Jawa. Saat ini peran jagung sangat penting menjaga ketersediaan daging dan telur ayam.

"Itu Baru jagung, masih banyak lagi tanaman pangan semusim yang akan menjadi pelengkap pangan masyarakat seperti Bengkung, Ubi Manis, Kimpul, Ubi Buah, Ubi Jalar, Ubi Kayu, Ubi Gadung, Talas Bogor, Suweg, Kacang-kacangan dan lain sebagainya yang saat ini masih belum di masifkan programnya di kementan.

Diversifikasi ini akan mampu meluas merata selIndonesia, bila ada sinergi para petani



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Saat ini, pengembangan pangan musti mulai melebar tidak hanya pada produksi beras. Meskipun Beras menjadi fokus utama dengan perkiraan konsumsi masyarakat sebesar 29,58 juta ton, program diversifikasi mesti tetap berjalan sehingga ada alternatif pangan yang secara perlahan dapat dipersiapkan",

yang memproduksi, dan pemerintah yang menyediakan fasilitas untuk proses tata niaganya", ucap Akmal.

Persoalan permodalan, Lanjut Akmal, kerap kali

menjadi kendala serius di kalangan petani, karena mereka ini pelaku usaha yang mikro dan tidak bankable

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



PKS



**Akun Facebook Official
Fraksi PKS DPR RI**

BERPINDAH

dari **Fraksi PKS DPR RI**
menjadi

FPKS DPR RI



Aleg PKS: Pemutaran Film G-30 S-PKI Perlu Dilakukan Sebagai Pengingat Sejarah

KUTIPAN

Jakarta (29/09) --- Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengingatkan peristiwa 30 September yang diperingati tiap tahunnya sebagai upaya Kudeta pemerintahan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Saat itu, kata Sukamta, PKI mencoba merongrong ideologi Pancasila. Film tentang G-30 S-PKI yang sempat tidak ditayangkan lagi, kini didorong agar diputar kembali.

"Peristiwa G-30 S-PKI merupakan sejarah kelam bangsa kita. Generasi sekarang dan yang akan datang tidak boleh lupa akan sejarah ini. Karenanya kami mendorong TV/RI perlu memutar kembali film tersebut sebagai pengingat sejarah," ungkap Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan komunisme menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa kita.

"Hal tersebut merupakan amanat UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN)

Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi ancaman terhadap bangsa dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, dan seterusnya," ujar Sukamta.

Sukamta juga menjelaskan beberapa hal dikhawatirkan dapat menghilangkan sejarah yang pahit tersebut dari memori bangsa. Di antaranya penghapusan kata 'PKI' dalam G-30S dari buku-buku pelajaran sejarah di sekolah. Sempat juga ada wacana penghapusan TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang pelarangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme.

"Kita bukan ingin membuka luka lama, juga bukan ingin menimbulkan kebencian di tengah masyarakat, tapi hanya agar kita tidak lupa. PKI

dulu telah melakukan pembantaian terhadap rakyat Indonesia, khususnya kalangan agamawan, bahkan jenderal-jenderal kita juga menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan dengan isu Dewan Jenderal. Namun upaya kudeta ini tidak berhasil. Pemerintah setelah peristiwa itu melakukan penumpasan terhadap PKI dengan melakukan penangkapan dan eksekusi terhadap para anggotanya," jelas Sukamta.

Sukamta menegaskan, Mungkin saja kita bisa memaafkan sejarah kelam tersebut, tapi tentu tidak boleh melupakan, agar peristiwa serupa tidak terjadi pada masa datang.

"Kita juga bukan anti dengan negara komunis. Toh kita juga bekerja sama dengan negara-negara komunis selama ini. Yang kita anti adalah ajaran-ajaran komunis yang tidak berketuhanan merusak ke dalam pikiran bangsa kita. Ajaran anti-tuhan tersebut jelas bertentangan dengan jati diri bangsa yang berketuhanan yang terkandung dalam Pancasila," terang Sukamta.]

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Di Yogyakarta

"Jadi kita bicara film G-30 S-PKI bukan hanya sekadar soal film, tapi juga karena melihat situasi kondisi terkini. Kita tidak ingin bangsa ini tercabik-cabik oleh 2 kekuatan besar tadi. Dan ini sangat perlu kita dorong agar semua tersadar, sehingga Pancasila akan tetap sakti dan persatuan bangsa akan tetap kokoh,"

FPKS DPR RI Serukan Nonton Bareng Film G30S/PKI untuk Kokohkan Semangat Kebangsaan

KUTIPAN

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini acara nobar film G30S/PKI digelar setiap tahun oleh keluarga besar PKS dalam rangka mengokohkan semangat kebangsaan dan mengingatkan memori kolektif bangsa terhadap sejarah kelam kekejaman PKI.

Jakarta (30/09) — Fraksi PKS menginstruksikan jajarannya di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan acara nonton bareng (nobar) film G30S/PKI bersama masyarakat.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini acara nobar film G30S/PKI digelar setiap tahun oleh keluarga besar PKS dalam rangka mengokohkan semangat kebangsaan dan mengingatkan memori kolektif bangsa terhadap sejarah kelam kekejaman PKI.

"Kita menolak lupa

kekejaman PKI dan upayanya yang ingin mengganti dasar negara Pancasila. Jangan sampai sejarah itu dilupakan atau bahkan dihapus dari memori kolektif bangsa. Bukan untuk menakuti atau menimbulkan trauma tapi justru untuk mengokohkan semangat kebangsaan, menjaga dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen," tandas Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, pelajaran penting dari kejadian PKI yang harus diwaspadai bangsa

Indonesia adalah propaganda fitnah, adu domba, dan pecah belah di antara anak bangsa. Kekejaman PKI, kata Jazuli, nyata dan tidak terbantahkan, baik pada peristiwa 1948 maupun 1965, dengan membunuh maupun melancarkan propaganda adu domba di antara anak bangsa.

"Silakan tonton bersama keluarga film pengkhianatan G30S/PKI. Dampingi putra putri kita, ajarkan sejarah yang benar tentang kejahatan PKI, tentang ajaran komunisme yang menyimpangi karakter dan jati diri bangsa yang berketuhanan dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Tanamkan pentingnya kesadaran untuk menjaga ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa," pungkas Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Kita menolak lupa kekejaman PKI dan upayanya yang ingin mengganti dasar negara Pancasila. Jangan sampai sejarah itu dilupakan atau bahkan dihapus dari memori kolektif bangsa. Bukan untuk menakuti atau menimbulkan trauma tapi justru untuk mengokohkan semangat kebangsaan, menjaga dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen"

Hutan Jadi Acuan Distribusi Dana Alokasi Umum ke Pemda, Fraksi PKS : Kami Perjuangkan!

KUTIPAN

Fraksi PKS DPR RI menerima kunjungan virtual dari Research Centre of Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (28/9).

Pihak RCCC UI dalam kunjungannya menyampaikan aspirasi terkait pembahasan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Menurut pihak RCCC UI, aspek luas tutupan hutan harus menjadi indikator maupun pertimbangan dalam distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

"Menurut kami, adanya indikator demikian dapat berkontribusi positif ke konservasi hutan di daerah-daerah. Jika luas tutupan hutan, Pemda berisiko untuk kehilangan pendapatan dari DAU. Sehingga, Pemda akan berusaha keras untuk menghambat laju deforestasi di wilayahnya masing-masing" ujar Esa Bayu Riyanto selaku

perwakilan dari RCCC UI.

Walhasil, menurut Esa, jika Pemda memiliki luas tutupan hutan yang semakin besar, DAU yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemda juga semakin besar.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PKS DPR RI Slamet menyambut baik gagasan tersebut. Baginya, usul tersebut merupakan terobosan yang unik. Ditambah lagi, ide ini berdampak langsung ke pelestarian lingkungan.

"Kami ucapkan terima kasih kepada RCCC UI atas terobosan dan gagasannya. Ini sesuai dengan semangat Fraksi PKS untuk menjaga keberlangsungan hutan di Indonesia. Kami juga melihat ini sebagai penguat pembangunan berkelanjutan di Indonesia" ujar Anggota

Komis IV DPR RI tersebut.

Slamet memintar RCCC UI untuk menyiapkan formula baru terkait dampak kebermanfaatan indikator luas tutupan hutan jika ingin dipakai sebagai indikator distribusi DAU. Dia menyarankan agar RCCC UI bisa memastikan bahwa peningkatan DAU pada daerah yang memiliki luas tutupan hutan yang besar bisa tersalurkan kepada konservasi hutan.

"Sehingga dana ini akan kembali ke pengelolaan hutan, bukan yang lain" ujar drh Slamet.

Terakhir, Slamet berharap agar RCCC UI terus membuka komunikasi dengan Fraksi PKS DPR RI. Dia juga berjanji akan membawa usul ini ke Panitia Kerja (Panja) RUU HKPD.

"Insya Allah kami akan sampaikan ini ke teman-teman Panja RUU HKPD. Karena ini sesuai dengan semangat kami untuk melestarikan lingkungan" tutup Slamet.



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

"Kami ucapkan terima kasih kepada RCCC UI atas terobosan dan gagasannya. Ini sesuai dengan semangat Fraksi PKS untuk menjaga keberlangsungan hutan di Indonesia. Kami juga melihat ini sebagai penguat pembangunan berkelanjutan di Indonesia"

Fraksi PKS Siap Tindaklanjuti Aspirasi HIMPSI Terkait Undang- Undang Psikologi

KUTIPAN

Jakarta (01/10) – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa menerima aspirasi dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) terkait pembentukan undang-undang psikologi.

Dalam aspirasi yang diadakan secara virtual tersebut, Ledia sepakat untuk mengintegrasikan peraturan terkait psikologi dibawah satu perundang-undangan untuk meminimalisir 'redundancy' peraturan psikologi.

“Profesi Psikolog dan kemagisterannya merupakan sesuatu yang krusial, sehingga diperlukan pembahasan lebih dalam untuk merumuskannya. Mengintegrasikan peraturan psikologi ini dapat menjadi salah satu jalan keluar agar lebih aman untuk kedepannya” ungkap Anggota Komisi X dari Fraksi PKS DPR RI ini.

Anggota Majelis Psikologi Pusat (MPP), Enoch

menambahkan bahwa lahirnya undang-undang psikologi sangat dinanti, sebab sejauh ini peraturan yang sudah ada berpotensi melahirkan konflik. Undang-undang ini nantinya juga dapat menjaga marwah profesi sesuai dengan etika layanan psikolog yang baik, benar serta bertanggungjawab seperti yang diungkap oleh Sekretaris Jenderal HIMPSI, Andik Matulessy.

“Masukan ini sangat kami terima, mudah-mudahan kami dapat bekerja sama dengan lebih intens untuk mendaklkanjuti aspirasi ini” tandas Ledia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Badan Legislasi DPR RI

“Profesi Psikolog dan kemagisterannya merupakan sesuatu yang krusial, sehingga diperlukan pembahasan lebih dalam untuk merumuskannya. Mengintegrasikan peraturan psikologi ini dapat menjadi salah satu jalan keluar agar lebih aman untuk kedepannya”

Terima Kunjungan DPRD DIY, **Fraksi PKS Berikan Sejumlah Saran**

KUTIPAN

Jakarta (28/09) - Fraksi PKS DPR RI menerima kunjungan dari FPKS DPRD DI Yogyakarta. Dalam kunjungannya, Fraksi PKS DPRD DIY menyampaikan aspirasi salah satunya masalah Dana Keistimewaan DIY.

"Kami berkunjung ke Fraksi PKS DPR dalam rangka silaturahmi dan menyampaikan aspirasi berupa masalah dana. Kami berharap Fraksi PKS DPR RI dapat membantu kami menindaklanjuti masalah-masalah tersebut" ujar Imam Taufik selaku Ketua Fraksi PKS DPRD DIY.

Dalam kunjungannya, perwakilan Fraksi PKS DPRD DIY menyampaikan bahwa dana istimewa masih belum transparan, sehingga pengawasannya sulit. Selama ini, wewenang Gubernur DIY pada dana istimewa cukup besar dan DPRD DIY memiliki keterbatasan untuk mengawasinya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam, Sukamta menayangkan adanya permasalahan Dana Keistimewaan DIY. Menurutnya, Fraksi PKS DPRD DIY sebaiknya mengusulkan

peraturan daerah (Perda) mengenai Dana Istimewa.

"Hal ini karena mengubah UU Daerah Istimewa cukup sulit, membutuhkan dukungan lintas partai." ujar Sukamta.

Sukamta juga menyarankan agar DPRD DIY meminta bantuan masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Daerah Istimewa. Pasalnya, jika UU ini memiliki masalah, pemohonannya dapat dikabulkan oleh MK.

"Peluangnya lebih besar, dan tentu, untuk melakukan ini perlu ada konsultasi dengan masyarakat" ujar Anggota DPR RI Dapil Yogyakarta tersebut.

Terakhir, Fraksi PKS akan memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti "Insya Allah kami akan perjuangan aspirasi teman-teman DPRD ke komisi terkait" tutup Sukamta.



H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DI Yogyakarta

"Fraksi PKS DPRD DIY sebaiknya mengusulkan peraturan daerah (Perda) mengenai Dana Istimewa. Hal ini karena mengubah UU Daerah Istimewa cukup sulit, membutuhkan dukungan lintas partai"





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Selamat

HARI DOKTER NASIONAL

24 Oktober 2021

Tetaplah menjadi kebanggaan
Negara Indonesia dan menjadi garda
terdepan dalam pelayanan
kesehatan masyarakat.

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Waspadai PKI Gaya Baru, HNW Minta BNPT Waspadai Pengaburan Sejarah Komunis Radikal di Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (04/10) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengingatkan bahwa memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, wajarnya adalah dengan tidak melepaskannya dari konteks peristiwa yang menghadirkan bukti kesaktian Pancasila.

Pria yang akrab disapa HNW menambahkan kondisi tersebut bisa direalisasikan ketika ideologi Pancasila menggerakkan Negara/TNI bersama Bangsa dan Umat beragama, bangkit bersatu, menangkan dan selamatkan Pancasila dari rongrongan G30S PKI, yang bila PKI berhasil maka ideologi Negara Pancasila akan diubah sesuai ideologi komunisnya PKI.

"Radikalisme PKI yang memusuhi dan menjadikan korbannya dari kalangan TNI AD, Agama dan tokoh-tokoh Islam, telah digagalkan berkat kesatuan TNI AD dengan

Ormas Agama Islam seperti Muhammadiyah dengan Kokamnya dan NU dengan GP Anshornya. Itulah fakta sejarah Kesaktian Pancasila yang hadirkan kesatuan Umat Beragama (Islam) yang berhasil selamatkan NKRI dan Pancasila serta kalahkan radikalisme, terorisme dan intolerannya kaum komunis PKI, itulah yang mestinya paling utama dijelaskan, agar generasi muda memahami sejarah dengan baik dan benar, agar mereka dan NKRI tidak kembali jadi korban kejahatan dan bahaya laten

terorisme dan radikalisme PKI dengan ideologi komunismenya," papar HNW.

Maka aneh, imbuhnya, bila saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila malah menonjolkan isu radikalisme Agama, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan radikalisme Agama, dan Agama yang mana? Sebab itu bisa memunculkan saling curiga, dan memandang negatif kepada Agama, padahal Agama dengan Ormas Islamnya justru telah diakui Negara sebagai pihak yang berjasa menyelamatkan ideologi Pancasila dan NKRI dari radikalisme dan terorisme G30SPKI.

"Tentu saja kita mendukung upaya untuk menghadirkan kebanggaan generasi muda atas kepahlawanan dan jasa-jasa para Pahlawan Nasional yang telah hadirkan Republik Indonesia Merdeka, dengan ideologi Pancasila dan NKRI nya. Karenanya kita juga sepakat, menolak berbagai upaya untuk mengkaburkan

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

"Kita menolak intoleransi dan radikalisme, dan karenanya harus waspadai upaya-upaya yang ingin mengaburkan sejarah. Karena memang belakangan ada berbagai pihak yang bermanuver untuk mengaburkan sejarah, seperti tuntutan pencabutan TAP MPRS no XXV/1966 tentang pembubarhan PKI dan pernyataan PKI sebagai Partai Terlarang di Indonesia,

sejarah Bangsa dan perjuangan Pahlawan-pahlawan Bangsa baik dari kalangan Nasionalis Kebangsaan seperti Bung Karno, Hatta, Yamin, A Subarjo, maupun Nasionalis Keagamaan Islam seperti KH Wahid Hasyim, KH Abdul Kahar Muzakkir,

Agus Salim, Kasman Singodimejo, M Natsir, termasuk Nasionalis keagamaan non Islam spt AA Maramis," jelas HNW.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr Salim Segaf dan Ridwan Kamil Borong Gabah dari Petani Muda

KUTIPAN

Karawang (28/09) -- Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim Segaf Al Jufri bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan panen raya di Karawang, Jawa Barat, Selasa (28/9/2021).

Usai panen raya, Salim dan Ridwan Kamil menggelar sarasehan dengan seluruh petani di seluruh Indonesia secara daring sebagai bagian dari Peringatan Hari Tani 2021.

Salim ikut memborong 10 ton gabah kering dari petani muda di Desa Pasir Tanjung, Lemah Abang, Kab. Karawang. Salim menekankan pentingnya regenerasi di kalangan petani guna melahirkan petani milenial. Salim mengatakan, menurut data BPS 60,8 persen petani di Indonesia berusia di atas 45 tahun.

"PKS mendorong Pemerintah untuk memberikan akses permodalan dan insentif bagi profesi petani sehingga menarik generasi muda menjadi petani. Saat ini, regenerasi petani berjalan lambat dan berakibat pada

banyaknya petani dengan usia lanjut," ujar Salim.

Salim juga berpesan agar negara melindungi petani dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia meminta tata niaga komoditas pertanian harus berpihak pada kepentingan petani. Harus ada kebijakan agar harga tetap stabil sehingga petani tidak menanggung rugi terutama saat panen.

"Jangan ada lagi impor beras justru saat panen raya. Negara harus melindungi petani. Ini tanggung jawab pemerintah membantu petani sesuai amanat UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," sebut dia.

Salim menekankan, masa depan dunia adalah ketahanan pangan. Indonesia memiliki

potensi luar biasa dari sektor pertanian sehingga ke depan bisa menjadi negara besar jika keberpihakan terhadap petani dilakukan.

"PKS pernah mengirim Pak Anton Apriantono sebagai Menteri Pertanian dan berhasil melakukan swasembada beras sehingga tak perlu impor beras," paparnya.

Gubernur Ridwan Kamil mengamini jika masa depan dunia adalah food security. Jawa Barat, papar dia, sudah surplus produksi padi dan bahkan bisa mengirim 1 ton lebih untuk nasional.

"Kita sudah ujicoba metode baru di Jabar, kalau biasanya satu hektare bisa menghasilkan 5-6 ton, dengan metode baru bisa 10-11 ton dan ini sudah berhasil di tiga kabupaten," ungkap pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Emil juga melaporkan jika gerakan petani milenial sudah dilakukan di Jawa Barat. Ia mengetengahkan slogan "Hidup di Desa, Rezeki Kota" untuk mendukung petani milenial di Jawa Barat.

"Saat pandemi ada tiga sektor yang tumbuh dua diantaranya yakni soal pangan



Dr. SALIM
Ketua Majelis Syura PKS

"PKS mendorong Pemerintah untuk memberikan akses permodalan dan insentif bagi profesi petani sehingga menarik generasi muda menjadi petani. Saat ini, regenerasi petani berjalan lambat dan berakibat pada banyaknya petani dengan usia lanjut

dan digital. Jabar sudah menggabungkan keduanya agar anak-anak muda bisa berkecimpung di dunia pertanian. Di Jabar misalnya sekarang kasih makan ikan cukup lewat handphone,

mencari ikan di Pelabuhan Ratu cukup pakai aplikasi satelit. Yang biasanya 300 kg sekarang bisa 1 ton," terang Emil.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Berkunjung ke Surabaya, Presiden PKS Puji Penanganan Covid-19 di Jawa Timur

KUTIPAN

Surabaya (24/09) — Presiden PKS Ahmad Syaikhulmuji tiba di Surabaya Jawa Timur, Jum'at, 24 September 2021. Dalam kunjungannya itu, Ahmad Syaikhulmuji memuji penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

"Penanganan Covid di Jatim baik ya," ujarnya membuka perbincangan.

Pernyataan Syaikhulmuji ini diamini oleh Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan yang menyambut kedatangan Presiden PKS.

Irwan kemudian menyebut bahwa salah satu hal yang membuat Covid-19 di Jawa Timur terus membaik adalah doa-doa yang dipanjatkan para kiai.

"Di Jatim banyak pondoknya Pak Presiden, sepertinya doa-doa para kiai dan habaib yang ada di Jatim berpengaruh pada terus membaiknya kondisi Covid-19 di sini," jelas Irwan.

Kasus Covid-19 di Jawa Timur memang kian melandai. Bed Occupancy Rate (BOR) yang

menurun. Sedangkan testing, tracing dan treatment kian masif dilakukan.

Berdasarkan keterangan dari Kemenkes RI, Jatim telah terbebas dari level 3 & level 4.

Saat ini, di Jatim ada 19 kabupaten/kota dengan level 1 dan 19 wilayah masuk level 2.

Meski demikian, Syaikhulmuji tetap mengingatkan PKS Jatim untuk terus berperan serta dalam penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

"Tidak boleh lengah, teman-teman di Jawa Timur harus terus waspada," pesannya.

Mendengar pesan itu, Irwan menyatakan kesiapannya. Ia menyampaikan sudah berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat Covid-19 (TRCC) untuk terus bersiaga.

"Sesuai arahan DPP, kami sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk terus memasang telinga, untuk lingkungan terdekat," aku pria 45 tahun itu.

Irwan juga menyampaikan sudah menitipkan pesan kepada tim TRCC di semua wilayah di Jawa Timur untuk terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan aparat desa setempat dan tokoh masyarakat.

"In syaa Allah kami siap mendukung pemerintah provinsi dalam penanganan Covid-19," ujar Irwan.

Dalam kunjungannya, Syaikhulmuji didampingi Ketua DPP PKS Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) Sigit Sosiantomo, Ketua DPP Bidang Humas Ahmad Mabururi, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jatijaya Amin Ak dan Anggota Kantor Staf Khusus (KSP) PKS Sapto Waluyo.

Mereka disambut tim DPW PKS Jawa Timur. Antara Sekretaris Ahmadi, Bendahara Lilik Hendarwati, Ketua MPW Yusuf Rohana, Ketua Dewan Syariah M Ajir Moenip, Anggota



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

Dalam kunjungannya itu, Ahmad Syaikhulmuji memuji penanganan Covid-19 di Jawa Timur. "Penanganan Covid di Jatim baik ya," ujarnya membuka perbincangan.



DSW Habibul Muiz, Anggota DSW Abdul Karim, Ketua Bidang Humas Reni Astuti.

Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Syaikhulmuji dijadwalkan kunjungan ke

beberapa tempat, seperti ke petani Garam dan Cabe di Pamekasan, kunjungan ke pondok pesantren dan berziarah ke makam Syaikhuna Kiai Cholil.

Harga Garam dan Cabe Anjlok, Presiden PKS: Lindungi Petani dari Importir Gentayangan

KUTIPAN

Surabaya (25/09) --- Petani garam dan cabai yang ada di Pamekasan mengeluhkan harga garam dan cabai yang terus menerus anjlok.

Menanggapi ini, Presiden PKS Ahmad Syaikhmu meminta pemerintah untuk melindungi petani dari importir yang bergentayangan

"Importir-importir garam ini terus bergentayangan, petani tidak bisa berjuang sendiri. Insya Allah PKS akan terus mengawal hal ini," ujar Syaikhmu saat bertemu petani garam dan cabe di Pamekasan, Madura, Jum'at (24/9).

Lebih lanjut Syaikhmu mengatakan, jangan sampai pemerintah justru membantu orang-orang yang sudah kaya, dan melupakan petani yang sedang berjuang hidup.

Menurut Syaikhmu, anjloknya harga garam karena gempuran garam impor dengan harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik.

"Pemerintah menganggap kualitas garam lokal kurang memenuhi standar. Jika demikian seharusnya pemerintah melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas garam, bukan malah membuka kran impor sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Rosyidi, petani garam Desa Konang Pamekasan menyampaikan harga garam per kilonya terus menerus anjlok.

"Tahun 2017 harga garam perkilonya Rp 3.000, sekarang anjlok jadi Rp 500. Bagaimana kami sejahtera jika demikian kondisinya, yang ada kami menderitanya," keluhnya.

Belum lagi kerugian akan bertambah ketika hujan turun. Tak hanya itu, karena jalan yang

rusak, mobil yang mengangkut garam pernah jatuh ke sungai.

Dia berharap agar PKS bisa memperjuangkan nasib petani garam.

"Semoga presiden PKS bisa memperjuangkan kami," harapnya.

Syaikhmu berjanji akan memperjuangkan nasib petani garam dan cabe melalui anggota DPR RI maupun anggota DPRD, baik di provinsi dan kabupaten/kota. Juga melalui kepala daerah dari PKS atau yang diusung PKS.

"Terutama untuk yang ada di DPRD karena bisa berjuang melalui perda," pesannya.

Dalam kunjungannya, Syaikhmu didampingi oleh anggota DPR RI Amin Ak, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Maburri, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan, Sekretaris Ahmadi, Ketua Bidang Tani dan Nelayan Alwi Burhanuddin, Ketua Bidang Humas DPW PKS Jatim Reni Astuti, juga Ketua DPD PKS Pamekasan Abdullah, serta pimpinan dan anggota DPRD Fraksi PKS Pamekasan.



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

"Anjloknya harga garam karena gempuran garam impor dengan harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik. Pemerintah menganggap kualitas garam lokal kurang memenuhi standar. Jika demikian seharusnya pemerintah melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas garam, bukan malah membuka kran impor sebanyak-banyaknya"



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***